

PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI DALAM DISTRIBUSI SEMBAKO



Penyunting :
Darwin

**PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 2000**

PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI DALAM DISTRIBUSI SEMBAKO



**Penyunting
Darwin**

**PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Jakarta, 2000**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Pengembangan Peran Koperasi Dalam Distribusi Sembako/Penyunting, Darwin. –Cet.1.
Darwin, Jiwa Sarana, Hari Susanto, Endang Sri Soesilowati.
Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan – LIPI (PEP-LIPI), 2000
xii, 63 hlm, 21 cm.

ISBN 979-9165-12-1

@ Hak pengarang dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama 2000

Dicetak oleh: CV. Raga Meulaba

Penerbit: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PEP-LIPI)

Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta

Telepon: 5251542, 5207120 (Langsung); Fax: 5262139

KATA PENGANTAR

Penelitian **PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI DALAM DISTRIBUSI SEMBAKO**, merupakan salah satu dari sepuluh penelitian dan atau kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan (PEP-LIPI). Kegiatan ini tergabung dalam Proyek Litbang Potensi Sumber Daya Alam dan Sosial Ekonomi Dan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah-LIPI Tahun Anggaran 1999/2000.

Sebelum menjadi laporan akhir, kegiatan penelitian dan atau pemberdayaan ini telah diuji melalui berbagai tahapan proses penelitian yang panjang dan sangat ketat dalam bentuk diskusi, seminar dan penilaian akhir oleh Tim "Quality Assurance" PEP-LIPI. Dengan demikian, laporan hasil penelitian dan atau kegiatan pemberdayaan ini, secara akademik dapat dipertanggung jawabkan.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian dan atau pemberdayaan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Berkenaan dengan itu kami mengucapkan terima kasih. Kami juga sangat menghargai kerja keras para peneliti dan staf administrasi PEP-LIPI, sehingga berhasil menyajikan laporan penelitian ilmiah yang baik. Harapan kami semoga laporan ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengambilan keputusan atau kepentingan praktis lainnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran-saran konstruktif guna menyempurnaan laporan-laporan penelitian PEP-LIPI pada masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2000
Kepala Puslitbang Ekonomi dan
Pembangunan – LIPI

Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA. APU.
NIP: 320003805

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi

BAB I : KERANGKA ACUAN

Oleh: Darwin

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Lingkup Studi	3
1.4. Metodologi	3

BAB II : PERKEMBANGAN DAN KEADAAN KOPERASI DI KODYA BANDUNG DAN DENPASAR

Oleh: Jiwa Sarana

2.1. Pendahuluan	7
2.2. Perkembangan Koperasi	8
2.3. Kondisi Ekonomi Koperasi	12
2.4. Kesimpulan	21
Daftar Pustaka	23

BAB III : PERANAN KOPERASI DALAM PASOKAN DAN DISTRIBUSI SEMBAKO

Oleh: Hari Susanto

3.1. Pendahuluan	25
3.2. Identitas dan Modal Usaha Koperasi.....	27
3.3. Rasio Biaya-Manfaat Koperasi dalam Pasokan dan Distribusi SEMBAKO	33
3.4. Kaitan Koperasi dalam Pasokan dan Distribusi SEMBAKO terhadap Total Perdagangan SEMBAKO.....	40

3.5.	Kontribusi Pasokan dan Distribusi SEMBAKO terhadap Total Perdagangan Berbagai Komoditas Koperasi	44
3.6.	Kesimpulan	45
	Daftar Pustaka	47

BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI DALAM DISTRIBUSI SEMBAKO

Oleh: Endang Sri Soesilowati

4.1.	Pendahuluan	49
4.2.	Arspirasi dari Pengurus Koperasi	50
4.3.	Persepsi Masyarakat (Anggota dan Bukan Anggota) Terhadap Fungsi Koperasi	53
4.4.	Alternatif Pengembangan Fungsi Koperasi	57
4.5.	Kesimpulan	61
	Daftar Pustaka	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perkembangan Beberapa Variabel Ekonomi Koperasi di Kodya Bandung.....	9
Tabel 2.2. Perkembangan Beberapa Variabel Ekonomi Koperasi di Kodya Denpasar.....	11
Tabel 2.3. Tingkat Produktivitas Koperasi di Kodya Bandung..	14
Tabel 2.4. Tingkat Produktivitas Koperasi Sampel di Kodya Bandung.....	14
Tabel 2.5. Tingkat Produktivitas Koperasi di Kodya Denpasar..	15
Tabel 2.6. Profitabilitas Koperasi di Kodya Bandung.....	16
Tabel 2.7. Profitabilitas Koperasi Sampel di Kodya Bandung...	16
Tabel 2.8. Profitabilitas Koperasi di Kodya Denpasar.....	17
Tabel 2.9. Rentabilitas Ekonomi Koperasi di Kodya Bandung..	18
Tabel 2.10. Rentabilitas Ekonomi Koperasi Sampel di Kodya Bandung.....	18
Tabel 2.11. Rentabilitas Ekonomi Koperasi di Kodya Denpasar.	19
Tabel 2.12. Nilai Per Kapita Beberapa Variabel Ekonomis Koperasi Di Kodya Bandung.....	20
Tabel 2.13. Nilai Perkapita Beberapa Variabel Ekonomis Koperasi Di Kodya Denpasar.....	21
Tabel 3.1. Tahun Berdiri dan Jumlah Anggota Sampel Koperasi Menurut Lokasi Penelitian, Bandung Dan Denpasar.....	25

Tabel 3.2.	Proporsi Perkembangan Modal Kerja Menurut Unit Kegiatan.....	30
Tabel 3.3.	Modal Usaha Sampel Koperasi 1994-1998 Menurut Lokasi Penelitian Bandung dan Denpasar..	32
Tabel 3.4.	Omzet Usaha Koperasi di Bandung dan Denpasar 1994 dan 1998.....	34
Tabel 3.5.	Perubahan Harga Beras, Gula dan Minyak Goreng di Berbagai Pelaku Tata Niaga	37
Tabel 3.6.	Besarnya Sumbangan Nilai Tambah pada Pelaku Tata Niaga.....	39
Tabel 3.7.	Perkembangan Omzet Usaha Sampel Koperasi, 1994 dan 1998 Menurut Lokasi Penelitian Bandung dan Denpasar.....	41
Tabel 3.8.	Kontribusi Koperasi Terhadap Produksi dan Perdagangan, 1994 dan 1998.....	44
Tabel 3.9.	Peningkatan Produksi Unit Usaha Koperasi, 1994 dan 1998.....	45
Tabel 4.1.	Persentase Responden Berdasarkan Harapannya Terhadap Peran Koperasi Sebagai Distributor Sembako.....	54
Tabel 4.2.	Persentase Responden Berdasarkan Pendapatnya Terhadap Upaya Yang dapat Dilakukan oleh Koperasi Untuk Penyediaan Kebutuhan Sembako..	55
Tabel 4.3.	Persentase Responden Berdasarkan Harapannya Terhadap Bantuan Pemerintah Dalam Pengembangan Peran Koperasi Sebagai Distributor Sembako.....	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1.	Matarantai Distribusi Beras, Gula	35
Bagan 3.2.	Matarantai Distribusi Minyak Goreng.....	35

ABSTRAK

Krisis ekonomi telah memicu berbagai krisis lain yang salah satunya krisis Sembako. Hal ini membawa dampak buruk terhadap aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu dampak buruk krisis sembako adalah terancamnya kelangsungan hidup mayoritas rakyat Indonesia yang ditandai oleh meningkatnya jumlah penduduk yang kekurangan bahan sembako (starvation) yang selanjutnya menciptakan meluasnya kebringasan massa berupa penjarahan, perampokan dan lain sebagainya.

Krisis sembako bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang mengakibatkan harga sembako di luar negeri dan impor menjadi sangat mahal diikuti kenaikan harga domestik disertai kelangkaan stok karena banyak impor bersubsidi diekspor kembali ke luar negeri. Kondisi ini terjadi karena disaat tersebut perdagangan sembako menjadi ajang spekulasi distributor-distributor dan oknum-oknum bulog yang ikut menanggung di air keruh. Di satu sisi perdagangan sembako didominasi oleh individu-individu yang tentu lebih mempertimbangkan keuntungan mereka dari pada menanggung kepentingan masyarakat banyak. Disisi lain, jika masalah perdagangan sembako ingin dihindarkan dari permainan spekulasi, maka masyarakat banyak harus dilibatkan dalam perdagangan sembako. Dalam konteks inilah perlu mekanisme pelibatan rakyat dalam perdagangan sembako yang cukup memadai yakni melalui pengembangan peranan koperasi sebagai institusi masyarakat dalam distribusi sembako.

Studi pengembangan peran koperasi dalam distribusi sembako mengungkapkan bahwa secara umum peran koperasi relatif kecil dalam distribusi sembako baik terhadap nilai total aktivitas koperasi maupun terhadap total perdagangan sembako didaerah penelitian Bandung dan Denpasar. Peran koperasi dalam massa krisis meningkat pesat, namun, begitu krisis sembako berlalu, peran koperasi berkurang kembali. Untuk menjaga konsistensi pengembangan peran koperasi dalam distribusi sembako dalam konteks stabilitas pasokan dan distribusi, maka berbagai hambatan internal dan eksternal koperasi dalam distribusi sembako harus diatasi. Beberapa hambatan tersebut antara lain rendahnya kemampuan SDM, lemahnya akses dan permodalan, rendahnya tingkat kesadaran anggota, terbatas dan lemahnya SDM pembina serta fasilitasnya, kurangnya kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan koperasi (modal, pajak, dan lain-lain), dan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan (prosedur) pasokan sembako dari Bulog. Berbagai hambatan

ini memang merupakan masalah klasik koperasi secara keseluruhan, tetapi tidak pernah secara tuntas diatasi. Untuk itu studi ini merekomendasikan upaya pengembangan peran koperasi antara lain pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan dan pembina koperasi, kebijakan mempermudah koperasi dalam pinjaman modal dan pasokan sembako dari Bulog, keringanan pajak, kampanye nasional penyadaran berkoperasi, dan penciptaan networking antar koperasi. Berbagai kebijakan di atas semestinya dijabarkan dalam program yang lebih aplikatif dan dilaksanakan secara terus menerus.

BAB I
KERANGKA ACUAN

Oleh: Darwin



BAB I

KERANGKA ACUAN

Oleh: Darwin

1.1. Latar Belakang

Krisis moneter yang ditandai dengan terjadinya depresiasi nilai rupiah yang tajam terhadap mata uang asing telah memicu terjadinya inflasi. Mekanisme peningkatan harga sembako terjadi melalui peningkatan biaya yang terkait dengan impor dan kelangkaan jenis sembako yang lebih menguntungkan bila diekspor. Kenaikan harga sembako akibat depresiasi nilai rupiah terhadap mata uang asing tidak serta merta dapat diatasi secara sektoral melainkan mungkin dapat diatasi melalui mekanisme pengentasan krisis ekonomi secara nasional.

Krisis ekonomi dewasa ini telah menimbulkan kenaikan berkelanjutan harga sembako yang membuat distributor menimbun pasokan untuk spekulasi (termasuk ekspor gelap) dan konsumen mampu menimbun untuk keamanannya yang selanjutnya mendorong meroketnya permintaan melebihi persediaan (*demand exceeds supply*) dan berakibat pada kelangkaan pasokan yang pada gilirannya mengacaukan distribusi sembako. Keadaan distribusi yang sudah kacau ini diperburuk oleh peristiwa penjarahan bulan Mei 1998 dan berbagai peristiwa kriminal dengan intensitas semakin meningkat di hampir seluruh pelosok tanah air. Hal inilah yang menjadi faktor utama terhadap kekacauan sistem distribusi dewasa ini, disamping sistem yang ada tersebut memang cenderung oligopolistik pada tingkat distributor ke atas (produsen/pabrik) yang rawan terhadap permainan spekulasi¹.

Berbagai usaha untuk menjembatani persoalan pendistribusian SEMBAKO telah dilakukan oleh pemerintah, seperti usaha melibatkan INKOPAS, BULOG maupun BUMN (PT Dharma Niaga). Namun hingga kini belum ada pemecahan yang tuntas. Kendala terjadi pada keadaan sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia, sehingga selalu terjadi selisih yang relatif besar antara harga di pusat-pusat pendistribusian hingga ke konsumen akhir, terutama pada daerah-

¹ Darwin (ed.), *Penanganan Pasokan dan Distribusi SEMBAKO*, PEP – LIPI, Jakarta, 1998.

daerah yang terputus pola distribusinya. Sebagai misal pada puncak krisis pertengahan 1998, harga minyak goreng curah di pusat-pusat pendistribusian sebesar Rp.3.800,- per kilogram. Namun dalam kenyataannya bahwa penyaluran hingga ke tangan konsumen mencapai Rp. 6.500,- per kilogramnya. Hal ini juga terjadi pada beras, harga di tingkat BULOG sebesar Rp. 2.000,- namun hingga ke tangan konsumen telah mencapai Rp. 4.200,- per kilogramnya.

Kelangkaan dan kacaunya pendistribusian SEMBAKO membuka peluang spekulasi yang telah mendorong kenaikan harga yang semakin memberatkan masyarakat. Di sisi lain kenaikan tingkat pengangguran menurunkan tingkat pendapatan rata-rata yang kemudian melemahkan daya beli masyarakat, karena tingkat penghasilan yang cenderung menurun. Sebagai misal pendapatan per kapita penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun belakangan ini telah menurun dari sekitar US\$ 1.000,- menjadi sebesar US\$ 400². Kesimpulannya krisis telah memukul perekonomian masyarakat dari dua sisi yakni meningkatkan biaya hidup/hasil (sisi pengeluaran) dan menurunkan daya beli (sisi pendapatan).

Pendistribusian SEMBAKO yang efektif dan efisien tentunya diharapkan dapat menciptakan tingkat harga yang layak dijangkau oleh konsumen akhir. Artinya harga yang ditawarkan oleh pusat-pusat distribusi hingga konsumen akhir tidak mempunyai selisih yang cukup besar. Normalnya selisih itu berkisar antara 7 sampai 11 persen, seperti yang terjadi di negara-negara ASEAN. Sementara itu di Indonesia, selisih harga antara produsen dan konsumen mencapai 40 persen. Untuk mencapai target tersebut tentunya sistem pendistribusian SEMBAKO harus mempunyai jaringan yang cukup luas, tersebar dan saling bersaing, sehingga pendistribusian tersebut diharapkan mampu menjangkau konsumen yang terpencil sekalipun dengan harga yang pantas³

Secara konseptual, jaringan distribusi yang paling efektif adalah jaringan distribusi yang terbuka secara luas (*free entry and free exit*) untuk dimasuki oleh siapapun. Namun demikian, untuk menjamin tidak adanya permainan/spekulasi tentunya masyarakat konsumen harus dilibatkan melalui suatu wadah yang dimilikinya. Salah satu institusi ekonomi rakyat yang paling mungkin adalah koperasi karena koperasi dimiliki oleh anggotanya yang tentu akan mengutamakan kepentingan anggotanya sebagai konsumen akhir SEMBAKO.

² Hari Susanto, M. Sukarni, Suhadak dan MAS Hikam, **Kesejahteraan Buruh Dalam Krisis Ekonomi**, Jakarta: PEP – LIPI, 1999.

³ Lihat Darwin (ed.), op.cit., khususnya Bab V.

1.2. Tujuan

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk :

- Menganalisa keadaan, perkembangan dan peran koperasi dalam menjamin tersedianya pasokan dan distribusi sembako.
- Menyusun alternatif strategi peningkatan (optimalisasi) peran koperasi khususnya dalam pasokan dan pendistribusian sembako.

1.3. Lingkup Studi

Studi ini lebih ditekankan pada penyusunan konsep tentang peningkatan pemanfaatan/peranan koperasi dalam distribusi sembako.

Sementara itu secara terinci lingkup penelitian mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- Lingkup penelitian terbatas pada usaha pencapaian tujuan yang telah disinggung di atas.
- Komoditas yang termasuk ke dalam kajian adalah beras, minyak goreng, dan gula.
- Ukuran peranan koperasi dilihat, terutama secara internal, dalam konteks (*share*) perdagangan SEMBAKO terhadap keseluruhan aktivitas usahanya.
- Koperasi yang dijadikan obyek penelitian adalah koperasi terpilih yang telah melakukan proses pendistribusian SEMBAKO.

1.4. Metodologi

1.4.1. Pendekatan Studi

Pendekatan pertama dilakukan melalui pengamatan berbagai data sekunder yang dipublikasi berbagai instansi terkait dan berbagai referensi.

Sementara itu, pendekatan kedua dilakukan melalui usaha menangkap aspirasi masyarakat, melalui *indepth interview* terhadap beberapa nara sumber, seperti jajaran instansi vertikal di Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (PPK), institusi lain yang berkaitan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan pendistribusian SEMBAKO serta berbagai tokoh masyarakat. Selain itu

dilakukan wawancara dengan responden masyarakat (anggota dan bukan anggota koperasi).

Wawancara dengan responden dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (*questionnaire*) tersusun setengah terbuka. Teknik penentuan responden adalah *simple random sampling* dari populasi anggota koperasi terpilih dan masyarakat bukan anggota di wilayah kerja koperasi tersebut yang datang berbelanja ke koperasi yang bersangkutan.

1.4.2. Sumber Data

1.4.2.1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan penyebaran daftar pertanyaan (*questionnaire*) kepada pelaku koperasi dan masyarakat. Disamping itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan nara sumber (*indepth interviews*).

1.4.2.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui publikasi baik dari institusi pemerintah/swasta, misalnya Departemen Koperasi PPK, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi dan lainnya.

1.4.3. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data dan informasi, digunakan teknik analisis deskriptif baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

1.4.4. Sampel Studi

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sampel studi di masing-masing daerah adalah:

- a. Koperasi yang sudah bergerak di bidang SEMBAKO (4 buah) di Kodya Bandung .
- b. Koperasi yang belum bergerak di bidang SEMBAKO (3 buah) di Kodya Denpasar.
- c. Anggota masyarakat yang menjadi anggota koperasi dan bukan anggota koperasi masing-masing 75 orang di Kodya Bandung dan Denpasar.

1.4.5. Lokasi Studi

Lokasi studi dipilih Kodya Bandung dan Denpasar dengan pertimbangan kedua lokasi tersebut terdapat koperasi yang bergerak dalam pendistribusian SEMBAKO, serta kebutuhan SEMBAKO yang cukup tinggi di kedua daerah tersebut.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN KEADAAN KOPERASI DI KODYA BANDUNG DAN DENPASAR

Oleh: Jiwa Sarana

BAB II

PERKEMBANGAN DAN KEADAAN KOPERASI DI KODYA BANDUNG DAN DENPASAR

Oleh: Jiwa Sarana

2.1. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak yang sangat buruk pada perekonomian Indonesia. Unit usaha besar maupun menengah yang aktivitasnya terkait dengan bahan baku impor banyak yang tidak mampu mengatasi gejala ekonomi yang terjadi pada saat krisis ekonomi sehingga banyak yang mengalami kebangkrutan. Kondisi ini menimbulkan efek berganda terhadap unit ekonomi lainnya yang semakin memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Pada kenyataannya, unit usaha kecil seperti koperasi yang lebih berorientasikan lokal/domestik aktivitas masih bisa bertahan dalam masa krisis ekonomi ini. Untuk itu, seyogyanya pemerintah terus berusaha memberikan peran yang semakin besar pada koperasi untuk menjaga stabilitas dan perkembangan perekonomian rakyat khususnya untuk masyarakat kecil.

Dalam menganalisis peranan koperasi, aspek perkembangan berbagai koperasi sangat perlu dikaji satu per satu. Jika setiap variabel yang menjadi komponen pengukur keberhasilan pembangunan perkoperasian berkembang baik, maka dapat menjadi indikator bahwa koperasi secara keseluruhan berkembang dengan baik pula, begitu pula sebaliknya.

Namun demikian, kenyataannya acuan utama yang sering digunakan dalam menentukan berkembang tidaknya koperasi adalah variabel jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah modal, volume usaha serta sisa hasil usaha (SHU). Secara makro dapat digunakan kelima variabel tersebut, tetapi secara mikro empat variabel terakhir lebih relevan digunakan. Perkembangan semua variabel tidak selalu dalam arah yang sama, misalnya jumlah koperasi dan anggota bisa saja berkurang, namun bila dilihat dari modal, volume usaha dan SHU meningkat dapat diartikan koperasi tersebut tetap berkembang. Jadi perkembangan yang sesungguhnya sangat ditentukan oleh perkembangan variabel ekonomi koperasi yakni modal, nilai volume usaha, dan akumulasi modal (tambahan modal) dari sisa hasil usaha.

Aspek lain yang juga sangat penting untuk mengevaluasi kinerja koperasi adalah keadaan/kondisi berbagai variabel ekonomi koperasi. Aspek ini dapat menjelaskan berkembang atau mundurnya suatu koperasi. Dalam konteks berkembangnya koperasi, analisis keadaan/kinerja koperasi bisa menggambarkan tingkat kualitas perkembangan tersebut, apakah cukup maksimal atau tidak. Indikator yang akan dianalisis dalam menggambarkan keadaan kondisi ekonomis koperasi adalah produktivitas, profitabilitas, rentabilitas dan nilai per kapita variabel ekonomis koperasi. Dalam kajian ini sayang sekali keterbatasan data menempatkan pengkajian fakta-fakta tentang perkembangan dan keadaan koperasi kurang terintegrasi dengan issue pasokan dan distribusi sembako, namun dirasa tetap dianggap penting sebagai background pengembangan peranan koperasi dalam pasokan dan distribusi sembako.

2.2. Perkembangan Koperasi

2.2.1. Perkembangan Koperasi di Kodya Bandung

Koperasi yang ada di Kodya Bandung sekitar 1.099 buah koperasi pada tahun 1999 yang terdiri dari berbagai jenis koperasi seperti KUD, KSU, Kopontren, Kopkar dan lain-lain.

Secara umum perkembangan jumlah koperasi di Kodya Bandung mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 3,6% per tahun dalam periode 1994 s/d 1997 dan 22,89% pada periode 1997 s/d 1999. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 1997 s/d 1999 yang merupakan periode krisis disebabkan karena banyaknya koperasi-koperasi baru yang didirikan untuk mengatasi penanganan pasokan sembako dalam rangka membantu masyarakat mengatasi krisis sembako. Kenyataannya koperasi-koperasi baru tersebut kebanyakan digunakan penggunaannya untuk mendapatkan subsidi harga sembako dari pemerintah yang kemudian menjadi sumber keuntungan besar bagi kelompok pengurus koperasi karbitan tersebut. Dalam hal ini pemerintah memang memprioritaskan koperasi dalam pengelolaan pasokan sembako ke masyarakat.

Tabel 2.1.

Perkembangan Beberapa Variabel Ekonomi Koperasi
di Kodya Bandung

Keterangan	Tahun			Pertumbuhan rata-rata/th (%)	
	1994	1997	1999	1997	1999
Jumlah Koperasi	874	972	1.408	3,6	22,89
Anggota	302,544	399,086	352,621	9,67	(6,0)
Modal kerja (juta Rp.)	104,664	107,165	192,451	0,79	34,01
- Sendiri	59,465	63,186	176,417	2,04	67,09
- Luar/pinjaman	45,199	43,979	16,340	(0,9)	(39,62)
Volume Usaha (juta Rp)	55,779	91,304	278,823	17,85	74,75
SHU (Juta Rp.)	2,292	2,525	16,804	3,28	157,97

Sumber : Kanwil Departemen Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Barat
Keterangan: Angka dalam kurung adalah minus.

Jumlah anggota koperasi sebelum masa krisis (1994 s/d 1997) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,67% per tahun. Sebaliknya pada periode masa krisis (1997 s/d 1999) terjadi penurunan jumlah anggota koperasi yakni rata-rata sebesar 6% per tahun. Penurunan jumlah anggota koperasi pada masa krisis ini terjadi karena banyaknya anggota koperasi yang tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam membayar simpanan wajib ataupun mereka sudah tidak aktif lagi menjadi anggota.

Keadaan yang sangat kontras disini adalah kenyataan bahwa disatu sisi jumlah koperasi pada masa krisis mengalami pertumbuhan sebesar 22,89% per tahun, di sisi lain pada periode yang sama jumlah anggota mengalami penurunan. Ini bisa terjadi karena sebagian anggota koperasi yang menyatakan keluar dari koperasi untuk membentuk koperasi baru yang memang pada saat krisis berlangsung diberi kemudahan oleh pemerintah dalam memperoleh pasokan sembako dengan harga subsidi.

Perkembangan modal dari koperasi yang ada di Kodya bandung baik sebelum masa krisis maupun pada masa krisis

berlangsung mengalami kenaikan, tapi kenaikan yang cukup besar terjadi pada periode masa krisis, yakni rata-rata sebesar 34,01% per tahun. Kenaikan modal tersebut diakibatkan karena meningkatnya modal sendiri yang pada waktu krisis tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup besar yaitu 67,09% per tahun. Dalam hal ini, hasil indepth interview menjelaskan bahwa peningkatan yang pesat dari modal sendiri tersebut terutama untuk pasokan dan distribusi sembako. Meningkatnya modal sendiri tersebut dikarenakan terjadinya akumulasi SHU dan suntikan dana dari beberapa anggota (donatur). Dalam pada itu nilai modal luar/pinjaman koperasi pada masa krisis mengalami penurunan rata-rata sebesar 39,62% per tahun. Penurunan ini terutama dikarenakan tingginya suku bunga perbankan (>50%/tahun) yang mendorong kreditur koperasi lebih cenderung mendepositokan uangnya di Bank dan akses terhadap sumber dana pinjaman lain semakin sulit.

Dari sisi volume usaha koperasi mengalami perkembangan yang positif baik pada masa sebelum krisis maupun pada masa krisis berlangsung. Hal itu ditunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata volume usaha yaitu sebesar 17,85% per tahun pada masa sebelum krisis dan 74,75% per tahun pada masa krisis berlangsung. Meningkatnya volume usaha khususnya pada masa krisis, yang cukup besar itu, disebabkan karena anggota koperasi maupun masyarakat sekitarnya lebih senang memanfaatkan jasa koperasi dalam memenuhi kebutuhan pokoknya karena mudah dan cepat serta harga yang relatif lebih murah. Sejalan dengan itu, distribusi sembako memang pada masa krisis tersebut menjadi fokus utama dari usaha koperasi. Peningkatan volume usaha koperasi tersebut berdampak pada kenaikan perolehan SHU yakni rata-rata sebesar 3,28% per tahun pada periode tahun 1994 s/d 1997 dan 157,95% per tahun pada periode tahun 1997 s/d 1999.

Jadi secara umum, dapat disimpulkan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 kurang berdampak negatif pada koperasi itu sendiri, malah cenderung positif. Hal ini terbukti dari aktifitas perdagangan sembako di koperasi yang cenderung mengalami peningkatan dan banyak koperasi-koperasi baru yang didirikan untuk memanfaatkan peluang memperoleh benefit dadakan yang diberikan pemerintah dalam perdagangan sembako.

2.2.2. Perkembangan Koperasi di Kodya Denpasar

Perkembangan jumlah koperasi di Kodya Denpasar baik sebelum masa krisis (periode tahun 1996 sampai pertengahan tahun 1997) maupun pada masa krisis (pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1998) adalah tetap. Artinya bahwa selama tiga tahun tersebut jumlah koperasi tidak mengalami pertumbuhan (0%). Berbeda dengan

di Bandung, masyarakat di Denpasar memanfaatkan subsidi harga sembako yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis melalui intensitas kegiatan koperasi yang sudah ada, tidak dengan mendirikan koperasi-koperasi baru.

Secara lebih rinci perkembangan koperasi di Kodya Denpasar digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.

Perkembangan Beberapa Variabel Ekonomi Koperasi di Kodya Denpasar

Keterangan	Tahun			Pertumbuhan (%)	
	1996	1997	1998	1996 - 1997	1997- 998
Jumlah Koperasi	261	261	261	0	0
Anggota	201.623	227.723	239.206	12,94	5,04
Modal kerja (juta Rp.)	95.122,5	157.712	195.132	65,8	23,73
- Sendiri	69.150,5	122.485	161.510	77,13	31,86
- Luar/pinjaman	25.972	35.227	33.622	35,63	(4,56)
Volume Usaha (Juta Rp)	261.652	244.956	426.295	(6,38)	74,03
SHU (juta Rp)	15.561	17.276	28.602	11,02	65,56

Sumber : Pusat Data dan Informasi Departemen Koperasi dan PKM Pusat

Jumlah anggota yang ikut aktif di koperasi di Denpasar meningkat rata-rata, sebesar 12,94% pada periode 1996-1997 (sebelum krisis) dan 5,04% pada 1997-1998 (masa krisis ekonomi berlangsung). Menurut hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, peningkatan jumlah anggota koperasi tersebut disebabkan banyaknya anggota masyarakat yang tergerak untuk menjadi anggota koperasi karena dengan menjadi anggota koperasi mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok (sembako) mereka, yang pada waktu itu sulit diperoleh dipasaran. Kenyataannya bahwa pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lebih mudah apabila mereka mengambil/membeli di koperasi khususnya apabila mereka menjadi anggota koperasi. Sementara itu di toko/warung, masyarakat sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, disamping karena harganya mahal juga terbatasnya atau tidak adanya " stock " kebutuhan pokok. Sedang kalau mereka membeli di grosir harus dalam jumlah yang besar

sehingga mereka tidak mampu membelinya, maka banyak dari mereka yang mengalihkan pemenuhan kebutuhan pokoknya melalui koperasi.

Peningkatan jumlah anggota koperasi di Kodya Denpasar dalam tiga tahun tersebut disamping karena fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh apabila menjadi anggota, juga dikarenakan sistem sosial yang ada di Kodya Denpasar. Keberadaan koperasi di wilayah Kodya Denpasar sangat berkait erat dengan sistem sosial kekerabatan yang erat dan bertingkat didalam masyarakat yang bersangkutan. Kenyataannya koperasi yang ada di wilayah Kodya Denpasar sebagian besar dikelola oleh pemuka desa/banjar yang jadi panutan, sehingga penghimpunan anggota dan modal mejadi lebih mudah.

Dalam pada itu seiring dengan peningkatan jumlah anggota koperasi di Denpasar modal koperasi juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Sebelum krisis ekonomi modal koperasi meningkat yaitu 65,6% sedangkan pada masa krisis meningkat sebesar 23,73%. Tingginya pertumbuhan modal tersebut karena didorong dengan meningkatnya akumulasi modal sendiri yang berasal dari sebagian anggota dan SHU yang sebagian besarnya dihimpun untuk keperluan perdagangan sembako. Di sisi lain, modal luar/pinjaman pada masa krisis, justru berkurang sebesar 4,56%. Hal ini terjadi disamping karena tingginya suku bunga perbankan, juga disebabkan kesulitan likuiditas yang dialami para kreditor.

Di lihat dari sisi volume usaha, sebelum dan menjelang masa krisis (1996-1997) terjadi penurunan sebesar 6,38% sedangkan pada masa krisis (1997-1998) justru terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 74,03%. Meningkatnya volume usaha pada masa krisis tersebut, terutama disebabkan oleh penjualan sembako yang mengalami lonjakan.

Dengan meningkatnya volume usaha tersebut maka terjadi pula kenaikan SHU yang dihasilkan. Peningkatan SHU yang cukup tajam justru terjadi pada saat krisis sedang berlangsung yaitu sebesar 65,56%.

2.3. Kondisi Ekonomis Koperasi

Dalam menganalisis kondisi ekonomis koperasi di Kodya Bandung dan Denpasar, dapat dipakai berbagai indikator yang menjadi komponen pengukur kinerja suatu koperasi. Karena keterbatasan data, maka dalam penelitian ini, hanya akan diukur beberapa indikator ekonomis koperasi antara lain: tingkat produktivitas, profitabilitas, rentabilitas dan nilai per kapita beberapa variabel ekonomis koperasi.

Tingkat produktivitas memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Indikator produktivitas adalah Rasio yang dihasilkan dari perbandingan antara volume usaha dengan modal koperasi.

Selanjutnya indikator kinerja koperasi yang dipakai adalah profitabilitas dan rentabilitas. Kedua indikator ini secara umum sering dianggap sama, yakni menunjukkan kemampuan usaha menghasilkan laba. Namun dalam kenyataannya disini agak berbeda. Indikator rentabilitas lebih menggambarkan kemampuan usaha untuk menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Konsep ini tidak mengakomodir frekuensi/perputaran modal, sehingga nilai rasio (indikator) yang dihasilkan cenderung akan lebih besar yang selanjutnya memberikan gambaran seolah-olah tingkat keuntungan yang diperoleh relatif tinggi. Dalam pada itu indikator profitabilitas lebih diartikan sebagai gambaran yang mengucapkan tingkat laba rata-rata dari total transaksi (gross sales) pertahun.

Profitabilitas merupakan analisis keuntungan rata-rata pertransaksi yaitu menunjukkan seberapa besar proporsi keuntungan (dalam hal ini SHU) yang diperoleh dari setiap unit volume usaha koperasi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan/rasio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan volume usaha.

Rentabilitas Ekonomis merupakan alat analisis untuk mengukur efisiensi penggunaan modal koperasi dalam artian sebagai alat untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang ada untuk menghasilkan laba. Jadi variabel yang akan dibandingkan adalah Laba (SHU) dengan modal.

Indikator terakhir yang digunakan untuk melihat kinerja ekonomi koperasi adalah nilai perkapita anggota dari setiap variabel ekonomi koperasi.

Nilai per kapita beberapa variabel ekonomi koperasi ini akan mengukur keberartian besaran nilai variabel per anggota koperasi. Dalam indikator ini, semua variabel ekonomis koperasi akan dibagi dengan jumlah anggota.

2.3.1. Tingkat Produktivitas

2.3.1.1. Kodya Bandung

Tingkat produktivitas koperasi di Kodya Bandung dari sebelum masa krisis sampai dengan saat krisis mengalami peningkatan yang cukup berarti seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.

Tingkat Produktivitas Koperasi di Kodya Bandung

No.	Tahun	Tingkat Produktivitas
1	1994	0,53
2	1997	0,85
3	1999	1,45

Data diolah berdasar data primer

Pada masa sebelum krisis tingkat produktivitas koperasi di Kodya Bandung adalah 0,53 artinya bahwa modal (input) yang ada di koperasi hanya dapat menghasilkan output (volume usaha/penjualan) sebesar 0,53 atau 53% dari modal usaha. Artinya selama tahun 1994 hanya 53% dari modal yang terpakai dan 47% sasanya tidak terserap (idle). Tingkat produktivitas ini cukup rendah apabila kita bandingkan dengan masa krisis yaitu sekitar tahun 1999 yang tingkat produktivitasnya sebesar 1,45. Disini artinya semua modal terpakai bahkan 45%nya terpakai dalam dua kali putaran. Meningkatnya tingkat produktivitas koperasi pada masa krisis ini sebagai akibat dari meningkat tajamnya penjualan sembako.

Sebagai contoh kasus empat sample koperasi yang mendistribusikan sembako di Kodya Bandung, baik dalam kategori koperasi maju, sedang, kurang maju, kenyataan secara rata-rata menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata produktivitas koperasi secara keseluruhan di daerah ini. Hal ini dapat dipahami karena tidak semua koperasi di daerah ini bergerak dalam perdagangan terutama sembako, dimana sebagian koperasi hanya merupakan koperasi simpan pinjam yang dalam satu tahun perputaran modalnya hanya satu kali dan tidak pula terserap semuanya. Sedangkan sampel koperasi semuanya bergerak dalam perdagangan khususnya sembako yang penggunaan modalnya dalam satu tahun berulang-ulang.

Tabel 2.4.

Tingkat Produktivitas Koperasi Sampel di Kodya Bandung

No.	Tahun	Tingkat Produktivitas
1	1996	3,7
2	1997	4,5
3	1998	4,6

Data diolah berdasar data primer

Pergerakan tingkat produktivitas dari koperasi sampel yang ada di Kodya Bandung mempunyai pola yang sama dengan pergerakan tingkat produktivitas koperasi yang ada di Kodya Bandung.

2.3.1.2. Kodya Denpasar

Tingkat produktivitas dari koperasi yang ada di Kodya Denpasar pada masa sebelum krisis yaitu periode tahun 1996 adalah sebesar 2,75 menurun pada awal krisis menjadi 1,55 dan mulai meningkat kembali pada masa krisis menjadi 2,18 , seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.

Tingkat Produktivitas Koperasi di Kodya Denpasar

No.	Tahun	Tingkat Produktivitas
1	1996	2.75
2	1997	1,55
3	1998	2,18

Data diolah dari tabel 2

Sama seperti kasus yang terjadi pada koperasi yang ada di Kodya Bandung, di Kodya Denpasar tingkat produktivitas koperasi mengalami peningkatan pada masa krisis ini dari periode sebelumnya. Selain dipicu dengan meningkatnya aktifitas penjualan sembako maupun kebutuhan sehari-hari juga karena adanya kecenderungan anggota koperasi memanfaatkan koperasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya (berdasarkan pada pengamatan di lapangan), sehingga ini berdampak pada meningkatnya volume usaha.

2.3.2. Profitabilitas

2.3.2.1. Kodya Bandung

Proporsi keuntungan (profit rates) yang dihasilkan dari volume usaha oleh koperasi yang ada di Kodya Bandung pada masa sebelum krisis yaitu periode sebelum tahun 1997, awal krisis periode pertengahan tahun 1997, serta masa krisis mengalami pasang surut. Profit rates tertinggi yaitu pada masa krisis sebesar 6%. Keadaan ini seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6.

Profitabilitas Koperasi di Kodya Bandung

No.	Tahun	Profitabilitas (%)
1	1994	4,1
2	1997	2,8
3	1999	6,0

Data diolah berdasar data primer

Pada awal krisis periode tahun 1997, profitabilitas koperasi di Kodya Bandung mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 2,8%. Keadaan tersebut dikarenakan pada awal krisis keadaan ekonomi masyarakat sedang mengalami kemunduran sehingga aktifitas ekonomi masyarakat berkurang yang berdampak pada koperasi dengan adanya penurunan volume usaha yang cukup besar sehingga SHU yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Keadaan tersebut sedikit demi sedikit mengalami perubahan ke arah yang menggembirakan dimana sejalan dengan masa krisis sampai dengan tahun 1999, kegiatan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan serta aktifitas usaha bergerak maju khususnya untuk penjualan sembako. Keadaan ini membuat tingkat keuntungan yang dihasilkan (profitabilitas) koperasi pada awal krisis (1997) sampai dengan tahun 1999 mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 6%.

Sebagai contoh kasus dari koperasi yang ada di Kodya Bandung adalah koperasi yang sudah cukup maju di Kodya Bandung, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7.

Profitabilitas Koperasi Sampel di Kodya Bandung

No.	Tahun	Profitabilitas (%)
1	1996	2,1
2	1997	0,9
3	1998	0,8

Data diolah berdasar data primer

Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa profitabilitas dari salah satu koperasi yang digunakan sebagai sampel di Kodya Bandung yang merupakan salah satu koperasi yang sudah cukup maju ternyata mempunyai profitabilitas yang cukup jauh di bawah dari koperasi yang ada di Kodya Bandung. Keadaan ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat produktivitasnya cukup tinggi (seperti pada

tabel 6) tidak menjamin bahwa koperasi tersebut mempunyai profitabilitas yang tinggi pula. Penyebab mengapa profitabilitas dari koperasi tersebut sangat rendah sedangkan tingkat produktivitasnya cukup tinggi karena penghasilan dari koperasi tersebut banyak yang digunakan membayar kewajibannya (hutang) kepada kreditor. Rata-rata koperasi tersebut harus membayar hutang modal pinjaman per tahunnya sebesar Rp. 2.164 juta yang dalam pembukuannya diposisikan sebagai "cost" (data diolah berdasar data primer), sehingga SHU yang dihasilkan sangat kecil.

2.3.2.2. Kodya Denpasar

Tingkat keuntungan yang dihasilkan dari koperasi yang ada di Kodya Denpasar, secara detail disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8.

Profitabilitas Koperasi di Kodya Denpasar

No.	Tahun	Profitabilitas (%)
1	1996	5,9
2	1997	7,0
3	1998	6,7

Data diolah berdasar data primer

Berbeda dengan apa yang terjadi pada koperasi yang ada di Kodya Bandung, profitabilitas dari koperasi yang ada di Kodya Denpasar pada awal krisis periode tahun 1997 justru mengalami peningkatan menjadi 7% seiring dengan meningkatnya harga-harga khususnya sembako, sedangkan pada masa krisis sampai tahun 1998 justru mengalami penurunan menjadi 6,7%. Kondisi ini pada awal-awal krisis aktifitas usaha dari koperasi mengalami peningkatan sehingga SHU yang dihasilkan meningkat sedang pada periode berikutnya terjadi sedikit penurunan sejalan dengan menurunnya perdagangan sembako dari periode puncak krisis (akhir 1997 – pertengahan 1998).

Secara umum, walaupun kecenderungan kenaikan profitabilitas dari koperasi yang ada di Kodya Bandung lebih baik (adanya kecenderungan meningkat di tahun berikutnya) tapi secara absolut nilai keuntungan, koperasi yang ada di Kodya Denpasar lebih baik.

2.3.3. Rentabilitas Ekonomis

2.3.3.1. Kodya Bandung

Kemampuan koperasi yang ada di Kodya Bandung untuk menghasilkan laba dari sejumlah modal yang dimiliki, ditabulasikan seperti dibawah ini:

Tabel 2.9.

Rentabilitas Ekonomis Koperasi di Kodya Bandung

No.	Tahun	Rentabilitas Ekonomis(%)
1	1994	2,2
2	1997	2,4
3	1999	8,7

Data diolah berdasar data primer

Rentabilitas Ekonomis koperasi yang ada di Kodya Bandung pada masa sebelum krisis sampai dengan pada masa krisis cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup tajam tahun 1999 dimama rentabilitas ekonomisnya mencapai 8,7% jauh diatas rentabilitas ekonomis tahun 1997 yang hanya 2,4%. Peningkatan ini didorong dengan meningkatnya aktifitas pendapatan sembako setelah didera krisis sembako di Indonesia umumnya dan di kota Bandung khususnya.

Sebagai contoh kasus koperasi yang ada di Kodya Bandung yang merupakan salah satu sampel penelitian sebagai contoh koperasi yang sudah maju. Indikator/rasio rentabilitasnya terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.10.

Rentabilitas Ekonomis Koperasi Sampel di Kodya Bandung

No.	Tahun	Rentabilitas Ekonomis(%)
1	1996	7,8
2	1997	4,0
3	1998	3,7

Data diolah berdasar data primer

Dari tabel diatas terlihat bahwa, rentabilitas ekonomis dari koperasi sampel penelitian ternyata semakin lama semakin kecil. Bahkan pada tahun 1998 (masa krisis) rentabilitas ekonomisnya jauh dibawah rentabilitas ekonomis koperasi di Kodya Bandung. Rendahnya tingkat rentabilitas ekonomis dari koperasi ini dikarenakan sama seperti pada rendahnya tingkat profitabilitas karena banyak laba usaha yang digunakan untuk membayar kewajibannya pada kreditor.

2.3.3.2. Kodya Denpasar

Rentabilitas ekonomis koperasi di Kodya Denpasar cenderung mengalami peningkatan pada masa krisis ini. Pada masa krisis tersebut rentabilitas ekonomisnya sebesar 14,7% jauh diatas rentabilitas ekonomis pada awal krisis sekitar tahun 1997 yang hanya 10,9%. Peningkatan tersebut dikarenakan tingkat pertumbuhan SHU yang lebih besar dari pada modal yang dimiliki koperasi.

Tabel 2.11.

Rentabilitas Ekonomis Koperasi di Kodya Denpasar

No.	Tahun	Rentabilitas Ekonomis(%)
1	1996	16,4
2	1997	10,9
3	1998	14,7

Data diolah berdasar data primer

Apabila kita bandingkan dengan rentabilitas ekonomis koperasi di Kodya Bandung, maka koperasi yang ada di Kodya Denpasar mempunyai tingkat kemampuan untuk menghasilkan laba lebih besar bila dibandingkan dengan koperasi di Kodya Bandung. Tapi secara umum rentabilitas ekonomis dari koperasi baik yang ada di Kodya bandung maupun Kodya Denpasar masih berada dibawah tingkat suku bunga bank yang berlaku pada periode masing-masing.

2.3.4. Nilai Per Kapita Beberapa Variabel Ekonomis Koperasi

2.3.4.1. Kodya Bandung

Dari nilai absolut beberapa variabel ekonomi koperasi di Kodya Bandung nampak bahwa kinerja koperasi tersebut kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai absolut SHU yang dihasilkan yakni Rp.7000,- tahun 1994, kemudian menjadi Rp. 6000,- tahun 1997, dan

selanjutnya turun lagi menjadi Rp.5000,- tahun 1999. Keadaan ini memberikan gambaran negatif perkembangan makro koperasi di Kodya Bandung, dimana meskipun variabel modal dan volume usaha meningkat cukup signifikan, namun nilai SHU yang dihasilkan tetap turun. Proporsi SHU terhadap modal sendiri adalah 3,5% tahun 1994, maka tahun 1997 (awal krisis) proporsi ini turun menjadi 2,31%, dan selanjutnya turun tahun 1999 menjadi 1%. Indikator ini juga mengungkapkan berapa rate of return dari modal koperasi di Kodya Bandung sangat kecil jauh di bawah interest rate sektor perbankan. Jika keadaan buruk rata-rata koperasi di Kodya Bandung berlanjut lebih lama, mungkin sebagian besar koperasi tersebut akan gulung tikar. Namun demikian, karena kepentingan anggota pada koperasi tidak semata-mata benefit dalam bentuk keuntungan uang, maka diharapkan eksistensi koperasi di daerah ini masih akan berlangsung. Secara lebih rinci nilai perkapita beberapa variabel ekonomis koperasi di Kodya Bandung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12.

Nilai Per Kapita Beberapa Variabel Ekonomis Koperasi di Kodya Bandung (Rp)

Keterangan	Tahun			Pertumbuhan/ Tahun (%)	
	1994	1997	1999	1994-1997	1997-1999
Modal	350.000	270.000	550.000	(-8,3)	42,7
- Sendiri	200.000	260.000	500.000	9,1	38,7
- Luar/pinjaman	150.000	110.000	50.000	(-9,8)	(-32,6)
Volume Usaha	180.000	230.000	790.000	8,5	85,6
SHU	7.000	6.000	5.000	(-5,0)	(-5,3)

Data diolah berdasarkan data primer, (-) = negatif

2.3.4.2. Kodya Denpasar

Nilai per kapita dari variabel ekonomis koperasi di Kodya Denpasar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.13.

Nilai Per Kapita Beberapa Variabel Ekonomis Koperasi
di Kodya Denpasar (Rp.)

Keterangan	Tahun			Pertumbuhan/ Tahun (%)	
	1996	1997	1998	1996-1997	1997-1998
Modal	470.000	690.000	820.000	46,8	18,8
- Sendiri	340.000	540.000	680.000	58,8	25,9
- Luar/pinjaman	130.000	150.000	140.000	15,4	(-6,7)
Volume Usaha	1.300.000	1.080.000	1.780.000	16,9	64,8
SHU	80.000	80.000	120.000	0,0	50,0

Data diolah berdasarkan data primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecuali modal pinjaman, nilai per kapita dari variabel ekonomis koperasi yang ada di Kodya Denpasar menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam perbandingan, terlihat bahwa nilai absolut per kapita dari variabel ekonomi koperasi di Kodya Denpasar lebih tinggi dari pada koperasi yang ada di Kodya Bandung. Selain itu tingkat/proporsi SHU terhadap modal dan volume usaha di Denpasar juga cukup tinggi jauh di atas yang terjadi di Bandung. Ini menunjukkan bahwa koperasi yang ada di Kodya Denpasar lebih baik "performance"-nya, meski dalam nilai totalnya kecuali SHU berbagai variabel ekonomi, koperasi di Bandung cukup besar bila di bandingkan dengan koperasi yang ada di Denpasar.

2.4. Kesimpulan

Perkembangan koperasi di Kodya Bandung ditinjau dari berbagai variabel ekonomisnya secara menyeluruh (makro) cukup menggembirakan, dimana berbagai indikator makronya terutama dalam masa krisis meningkat dengan signifikan. Namun bila dilihat dari nilai perkapita variabel-variabel ekonomisnya, maka gambaran koperasi di Kodya Bandung ternyata kurang baik atau mengalami kemunduran. Sementara itu perkembangan koperasi di Kodya Denpasar baik secara total maupun dalam ukuran perkapita anggota mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

Sebenarnya kemerosotan koperasi di Kodya Bandung tertahan oleh lonjakan perdagangan sembako. Demikian halnya dengan koperasi di Kodya Denpasar di mana perkembangan koperasi yang signifikan juga akibat lonjakan perdagangan sembako. Jadi, meskipun

krisis ekonomi cenderung menekan perkembangan koperasi di kedua kota tersebut, namun krisis sembako yang diantisipasi pemerintah dengan subsidi harga dan kemudahan koperasi dalam perdagangan sembako telah berperan banyak dalam pengembangan koperasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Formasi, Tim. 1996. *Koperasi di Tengah arus Liberalisasi Ekonomi*. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian. 1993. *Koperasi Indonesia: Tinjauan dan Prospek*. Departemen Koperasi. Jakarta.
- LP3ES, Tim. 1995. *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Darwin. 1998. *Penanganan Pasokan dan Distribusi Sembako*. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan (PEP-LIPI). Jakarta.
- Koperasi Unit Desa Sinar Jaya. 1996. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD Sinar Jaya: Pada RAT KUD Sinar Jaya Tahun Buku 1996*. Bandung.
- , 1997. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD Sinar Jaya: Pada RAT KUD Sinar Jaya Tahun Buku 1997*. Bandung.
- , 1998. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD Sinar jaya: Pada RAT KUD Sinar Jaya tahun Buku 1998*. Bandung.
- Bambang Riyanto, Drs. 1981. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yayasan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta.

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI DALAM DISTRIBUSI SEMBAKO

Oleh: Endang Sri Soesilowati

BAB III

PERANAN KOPERASI DALAM PASOKAN DAN DISTRIBUSI SEMBAKO

Oleh : Hari Susanto

3.1. Pendahuluan

Model pembangunan dengan perkuatan kegiatan-kegiatan ekonomi skala kecil dewasa melalui pemberdayaan masyarakat, *community-based development*, sedang digalakkan. Pemberdayaan, *empowerment*, diduga dapat mengajak partisipasi masyarakat di dalam mengantisipasi berbagai program-program yang diajukan oleh pemerintah.

Partisipasi pada dasarnya berasal dari kata "*participation*" (Inggris) ; "*participo, participatum*" (Latin) yang berarti ambil bagian, dari "*pars*" (bagian) "*capio*" (mengambil). Partisipasi dalam hal ini sering disebut juga "peran-serta". Untuk memahami partisipasi dalam konteks koperasi ini, maka diperlukan pemahaman tentang koperasi. Dengan salah satu fungsi koperasi adalah mendistribusikan secara merata kesejahteraan kepada anggotanya, keikutsertaan/ keterlibatan anggota dan perasaan kepemilikan anggota di dalam proses kegiatan koperasi merupakan bentuk dari partisipasi.

Berbicara pada aspek pemberdayaan, maka apabila mengacu pada makna yang terkandung di dalam pasal 33 UUD 1945, pelaku ekonomi terpilih menjadi 3 (tiga), yakni badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMD) dan koperasi. Koperasi, dalam hal ini, adalah bentuk penjawantahan dari partisipasi masyarakat di dalam kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Seperti yang dinyatakan oleh Bung Hatta, sebagai berikut⁴ :

"...di antara kita masih ada orang yang ragu-ragu dan bertanya, apakah yang dimaksud dengan *usaha bersama* berdasar atas azas *kekeluargaan* itu benar-benar *koperasi*. Buah pikiran dalam pasal tersebut berasal dari saya sendiri memang *koperasilah* yang dimaksud dengan *usaha bersama* berdasar atas azas *kekeluargaan*..."

⁴ M. Hatta, Sambutan pada Musyawarah Nasional Pembangunan, Jakarta, 1957.

Singkatnya, koperasi mempunyai peranan besar di dalam posisinya memberdayakan masyarakat, meredistribusikan aset secara merata pada masyarakat Indonesia, serta diharapkan mampu menegakkan kembali bangunan perekonomian nasional, yang dewasa ini mengalami keterpurukkan.

Dalam kenyataannya, koperasi juga dihadapkan oleh kendala dan masalah yang bersifat internal, antara lain adalah masih rendahnya produktivitas, efisiensi, serta mutu produk dan pelayanan koperasi yang pada gilirannya menyebabkan lemahnya kemandirian dan daya saing ekonomi, seperti yang dialami oleh usaha kecil, menengah dan besar. Koperasi juga menghadapi kendala dan kemampuan aksesnya pada informasi, teknologi, modal, dan pasar. Selain itu koperasi juga memiliki kelemahan dalam hal mutu sumberdaya manusia, baik para pengelola maupun anggotanya.

Sebuah studi menunjukkan bahwa kunci keberhasilan koperasi Mondragon, Israel, di dalam mengatasi kemelut ekonomi antara lain adalah dianutnya paradigma keamanan pekerjaan (*job security*) yang didukung oleh visi masyarakat (terutama anggota koperasi), sistem pendidikan serta sistem lembaga keuangan yang mempunyai komitmen terhadap pemupukan modal (*capital formation*), dan yang kondusif bagi pengembangan atau penciptaan usaha-usaha⁵.

Kenyataan di Thailand juga menunjukkan besarnya peranan koperasi di dalam mengembangkan organisasi sosial ekonomi di pedesaan-pedesaan. Koperasi pada dasarnya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Shigetomi⁶ :

“The creation of group-based cooperative organizations is vitally important for the promotion of participatory development...”

Dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di atas, koperasi perlu diberikan peran yang cukup besar. Namun sebelumnya perlu dilakukan kajian terhadap berbagai variabel yang berpengaruh atau mempengaruhi satu dengan lainnya, agar didapat gambaran yang lebih jelas. Bagian ini pada dasarnya akan mengamati peranan koperasi di dalam kemampuan memasok dan mendistribusikan

⁵ J. A. Baker, “The Mondragon Model : A New Pathway for the Twenty-First Century”, di dalam F. Hesselbein, at.al., **Organization of the Future**, 1997, pp. 109-117.

⁶ Shin'ichi Shigetomi, **Cooperation and Community in Rural Thailand : An Organisational Analysis of Participatory Rural Development**, Tokyo, IDE, 1998, p.123.

sembako, khususnya beras, gula dan minyak goreng yang dianggap vital oleh ibu-ibu rumah-tangga penduduk.

Seberapa jauh perkembangan peran koperasi dewasa ini dalam memasok dan mendistribusikan kebutuhan pokok rumah tangga penduduk mendapat perhatian utama dalam kajian ini. Untuk itu, kajian akan dipilah menjadi 4 (empat) sub-bab penting, yakni :

- (a) Identitas dan Modal Usaha Koperasi,
- (b) Rasio Biaya-Manfaat Koperasi dalam Pasokan dan Distribusi SEMBAKO,
- (c) Kaitan Koperasi dalam Pasokan dan Distribusi SEMBAKO terhadap Total Perdagangan SEMBAKO, dan
- (d) Kontribusi Pasokan dan Distribusi SEMBAKO terhadap Total Perdagangan berbagai Komoditas Koperasi.

3.2. Identitas dan Modal Usaha Koperasi

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi, koperasi mempunyai tugas yang cukup besar apabila dikaitkan dengan semangat UUD/1945 pasal 33 dan UU 22/1992. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) koperasi yang harus diemban tersebut antara lain adalah, sebagai berikut⁷ :

- (a) Koperasi bertugas sebagai wahana untuk meningkatkan produksi dan menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, khususnya dalam menghasilkan komoditas pangan,
- (b) Koperasi bertugas sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan petani melalui kegiatan pengolahan dan agrobisnis, dan
- (c) Koperasi bertugas untuk berperan dalam proses penistribusian, yakni berbentuk jaringan usaha antar koperasi yang kemudian mengecerkannya kepada anggota.

Dalam kaitannya dengan butir ketiga di atas, pertanyaan yang dapat dikembangkan adalah "seberapa efektif koperasi mampu memasok dan mendistribusikan SEMBAKO antar koperasi, kepada anggotanya maupun kepada masyarakat umum (bukan anggota) ?

Sub-bagian ini mencoba mengidentifikasi berbagai kriteria dalam koperasi, khususnya jenis, jumlah anggota dan modal usaha

⁷ Herman A. Kusumo, "Memberdayakan Usaha . Koperasi", *AFKAR*, 3(5), 1998, pp. 39-73.

koperasi. Sebagai sampel kajian, studi ini mengambil sampel 7 (tujuh) koperasi di Bandung (Jawa Barat) dan Denpasar (Bali). Adapun koperasi yang dijadikan sampel antara lain :

- (a) Koperasi A, bergerak dalam bidang aneka usaha, berada di Bandung,
- (b) Koperasi B, bergerak dalam bidang perdagangan, berad di Bandung,
- (c) Koperasi C, bergerak dalam bidang jasa, berada di Bandung,
- (d) Koperasi D, bergerak dalam bidang jasa, berada di Bandung,
- (e) Koperasi E, bergerak dalam bidang produksi, berada di Denpasar,
- (f) Koperasi F, bergerak dalam bidang aneka usaha, berada di Denpasar, dan
- (g) Koperasi G, bergerak dalam bidang aneka usaha, berada di Denpasar.

Dari 7 (tujuh) sampel koperasi, umumnya bergerak di bidang perdagangan dan jasa (simpan-pinjam). Empat koperasi diantaranya didirikan pada tahun 1980-an, kemudian 2 (dua) koperasi didirikan pada tahun 1990-an dan hanya 1 (satu) yang didirikan pada tahun 1970-an.

Sementara itu, jumlah anggota di masing-masing koperasi berkisar antara 32 jiwa hingga 1.228 jiwa. Koperasi dengan jumlah anggota terkecil didirikan pada tahun 1998. Hal ini diduga terkait dengan kebijaksanaan pengalihan pendistribusian SEMBAKO yang selama ini dikuasi oleh perusahaan swasta kepada koperasi pasar (KOPPAS). Sementara itu, koperasi dengan jumlah anggota terbesar didirikan pada tahun 1990. Umumnya mereka yang menjadi anggota koperasi ini adalah para peternak dan pedagang.

Perkembangan modal usaha selama kurun waktu 1994-1998 pada umumnya meningkat, walaupun perkembangan di antara koperasi sifatnya variatif. Koperasi G di Denpasar selama kurun waktu 1994-1998 telah mampu meningkatkan modal usahanya mencapai hampir 5 (lima) kali lipat dengan tingkat pertumbuhan pertahunnya mencapai 90,72 persen. Urutan kedua diperlihatkan oleh Koperasi E di Denpasar dimana dalam kurun waktu 1994-1998 modal usahanya telah mencapai hampir 3 (tiga) kali lipat, dengan pertumbuhan pertahunnya mencapai 44,47 persen.

Tabel 3.1.

Tahun Berdiri dan Jumlah Anggota Sampel Koperasi
Menurut Lokasi Penelitian, Bandung dan Denpasar

NO	NAMA KOPERASI	TAHUN BERDIRI	ANGGOTA (Jiwa)
I.	BANDUNG		
01	Koperasi A	1979	307
02	Koperasi B	1971	800
03	Koperasi C	1986	677
04	Koperasi D	1998	32
II.	DENPASAR		
05	Koperasi E	1982	473
06	Koperasi F	1986	605
07	Koperasi G	1990	1.228

Sumber : Diolah dari Data Primer

Umumnya dari modal kerja yang ada, hanya sebagian kecil saja yang telah digunakan untuk unit kegiatan SEMBAKO. Di tahun 1994, proporsi modal kerja yang digunakan untuk keperluan unit kegiatan SEMBAKO hanya sebesar 2,25 persen dari total modal kerja koperasi yang diteliti. Namun, walaupun proporsinya relatif masih kecil untuk investasi modal kerja di unit kegiatan SEMBAKO tersebut, akan tetapi dalam kurun waktu 1994-1998, proporsinya cenderung meningkat. Seperti terlihat bahwa proporsi investasi modal kerja di unit kegiatan SEMBAKO telah mencapai 16,12 persen dari total modal kerja pada koperasi-koperasi yang diteliti. Disamping ada peningkatan secara relatif, yakni dari 2,25 persen di tahun 1994 menjadi 16,12 persen di tahun 1998 (lihat Tabel 3.2. di bawah) – pada saat yang sama juga terdapat kenaikan secara absolut modal kerja dari Rp. 905 juta di tahun 1994, kemudian menjadi Rp. 2,517 milyar di tahun 1998 (lihat Tabel 3.3. di halaman berikut ini).

Tabel 3.2.

Proporsi Perkembangan Modal Kerja Menurut Unit Kegiatan (persen)

NO	TAHUN	PENGUNAAN MODAL KERJA		
		SEBAKO	NON-SEBAKO*	TOTAL
01	1994	2,25	97,75	100,00
02	1995	2,91	97,09	100,00
03	1996	2,95	97,05	100,00
04	1997	6,55	93,45	100,00
05	1998	16,12	83,88	100,00

Sumber : Diolah dari Data Primer

* = termasuk unit kegiatan simpan-pinjam, perdagangan NON-SEBAKO dan lainnya.

Pesatnya kenaikan proporsi modal kerja, *working capital*, pada tahun 1997 dan 1998 tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan pada tahun-tahun tersebut dan kebijaksanaan pemerintah untuk memberdayakan, *to empower*, koperasi yang diharapkan sebagai sokoguru perekonomian nasional di masa mendatang. Peristiwa-peristiwa yang melatar-belakangi terjadinya pengalihan penggunaan modal kerja koperasi yang selama ini dari proporsinya sangat besar untuk unit kegiatan NON-SEBAKO dan perlahan-lahan ke unit kegiatan SEMBAKO adalah sebagai berikut :

- (a) Perubahan struktur politik di tahun 1997 telah mempengaruhi terganggunya struktur distribusi sembilan bahan pokok (SEBAKO). Distribusi yang selama ini dikuasai oleh para pengusaha, khususnya etnisitas Cina, telah tidak berjalan dengan baik. Alasannya, kerusuhan-kerusuhan akibat perubahan struktur politik telah mengganggu jalannya pendistribusian SEMBAKO, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Karena kerusuhan yang terjadi lebih bersifat penjarahan terhadap, khususnya, SEMBAKO – di lain sisi penguasaan deposit SEMBAKO adalah etnis Cina, maka kekesalan masyarakat meningkat menjadi masalah SARA (suku, agama dan raslisme),
- (b) Masalah distribusi SEMBAKO yang terganggu juga dihadapkan oleh produksi sektor pertanian, khususnya sub-sektor bahan makanan yang umumnya tidak maksimal. Boleh dikatakan bahwa sebagian tanaman bahan makanan mengalami kegagalan panen.

Kegagalan tersebut disebabkan oleh cuaca, seperti El-Nino dan El-Nina yang telah mengganggu struktur produksi tanaman bahan makanan. Hal ini tentunya mengurangi pasokan akan kebutuhan bahan makanan di dalam negeri, *demand exceeds its supply*,

- (c) Rendahnya pemenuhan kebutuhan domestik ditambah dengan rusaknya struktur distribusi SEMBAKO, telah memberikan inspirasi kepada pemerintah untuk menggalakkan dan/atau memfungsikan kembali koperasi sebagai unit usaha milik rakyat, atau sebagai sokoguru perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi untuk menamgani pendistribusian SEMBAKO di tanah air. Pemberian kesempatan pada koperasi pasar (KOPPAS) untuk menangani pendistribusian SEMBAKO merupakan kebijaksanaan yang dominan dari Departemen Koperasi dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil (PPK) di tahun 1997 dan 1998. Dan bahkan, Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) mensponsori pendirian unit usaha koperasi baru yang khusus diarahkan untuk mendistribusikan SEMBAKO, yakni Koperasi Distribusi Indonesia (KDI), dan
- (d) Atas dasar inilah diduga bahwa kesempatan yang diberikan oleh pemerintah cukup 'menjanjikan', maka koperasi-koperasi yang diamati di dalam penelitian ini juga memberikan porsi modal kerja yang lebih besar untuk pengembangan unit kegiatan SEMBAKO.

Kembali pada pengamatan 2 (dua) koperasi di halaman sebelumnya, Koperasi E dan Koperasi F, yang berada di Denpasar, Bali -- pada saat dilakukan penelitian, modal usahanya telah mencapai lebih dari Rp. 1 (satu) milyar. Kenyataan ini tentunya sangat menggembirakan. Meskipun krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997 dan 1998⁸, namun kedua koperasi tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Sementara itu Koperasi B dan Koperasi C di daerah penelitian Bandung mengalami pertumbuhan yang rendah. Seperti diperlihatkan pada Tabel 3.3. di halaman berikut ini, bahwa pertumbuhan modal usaha pertahunnya hanya sebesar 2,78 persen dan 13,04 persen. Selain itu modal usahanya masih di bawah Rp. 200 juta.

Apabila modal usaha dipilah menjadi modal tetap dan modal kerja, maka terlihat bahwa modal tetap relatif kecil. Pada tahun 1994 modal tetap dari 7 (tujuh) koperasi yang diteliti berkisar antara Rp. 4

⁸ Penelitian lapangan dilakukan pada bulan September 1999 di Bandung, Jawa Barat dan bulan Nopember 1999 di Denpasar, Bali.

(empat) juta hingga Rp. 33 juta. Sementara itu pada tahun 1998, modal tetap⁹ tersebut berkisar antara Rp. 12 juta hingga Rp. 333 juta. Peningkatan yang mencapai 10 kali lipat pada modal tetap Koperasi E di Denpasar karena umumnya pembagian sisa hasil usaha (SHU), *dividen*, yang seharusnya diserahkan pada karyawan, justru dijadikan simpanan sukarela.

Sementara itu, modal kerja koperasi yang diamati umumnya cukup besar, yakni mencapai Sekisar 15 kali lipat dari modal tetap. Gambaran ini dapat dimengerti bahwa proporsi modal kerja harus lebih besar dibandingkan dengan modal tetap. Kalau modal tetap cenderung lebih besar maka kegiatan operasional tentunya sangat terbatas. Proporsi modal kerja paling besar diperlihatkan oleh koperasi di Denpasar, Bali, yakni Koperasi E dan Koperasi G.

Sebaliknya modal kerja yang relatif masih kecil diperlihatkan oleh Koperasi C dan Koperasi D yang berada di Bandung, Jawa Barat. Dari gambaran sampel penelitian, koperasi pasar secara relatif mempunyai modal kerja yang masih terbatas

Tabel 3.3.

Modal Usaha Sampel Koperasi, 1994 dan 1998 (Rp. Juta)
Menurut Lokasi Penelitian, Bandung dan Denpasar

NO	NAMA KOPERASI	MODAL TETAP		MODAL KERJA		TOTAL	
		1994	1998	1994	1998	1994	1998
I.	BANDUNG	26	60	162	282	188	342
01	Koperasi A	6	22	22	69	28	91
02	Koperasi B	4	16	111	159	115	175
03	Koperasi C	16	21	29	29	45	50
04	Koperasi D	-	1	-	25	-	29
II.	DENPASAR	39	92	743	2.235	782	2.327
05	Koperasi E	33	333	347	723	380	1.056
06	Koperasi E	3	12	116	249	119	261
07	Koperasi F	3	47	280	1.263	283	1.310

Sumber : Diolah dari Data Primer

⁹ Tanpa mempertimbangkan modal tetap KOPPAS Bening Jati, Bandung, Jawa Barat, yang baru berdiri pada tahun 1998.

3.3. Rasio Biaya-Manfaat Koperasi dalam Pasokan dan Distribusi SEMBAKO

Meskipun pengamatan dalam kurun waktu 1994-1998 adalah situasi kritis, dimana tahun 1994-1997 dianggap sebelum terjadinya krisis ekonomi dan tahun 1997-1998 adalah tahun terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, kondisi penjualan (omzet) cenderung lebih baik setelah krisis dibanding sebelum krisis. Hal ini diperlihatkan melalui kenaikan omzet selama 1994-1998, dimana sewaktu tahun 1994 omzet usaha koperasi yang diteliti di Bandung dan Denpasar baru mencapai Rp. 205 juta dan Rp. 806 juta, kemudian di tahun 1998 menjadi Rp. 648 juta dan Rp. 4,2 milyar.

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam kurun waktu tersebut terdapat kenaikan di omzet koperasi yang diteliti di Bandung sebesar lebih dari 3 (tiga) kali lipat, sementara koperasi yang diteliti di Denpasar mengalami kenaikan mencapai lebih dari 5 (lima) kali lipat. Atau dalam kurun waktu tersebut, koperasi yang diteliti di Bandung mengalami pertumbuhan omzet pertahunnya mencapai 54,02 persen, sedangkan koperasi yang diteliti di Denpasar mengalami pertumbuhan omzetnya sebesar 105,36 persen pertahunnya. Untuk lebih jelasnya, lihat Tabel 3.4. di halaman berikut ini.

Ada beberapa spekulasi terhadap alasan yang mendasari kenyataan-kenyataan yang digambarkan di atas, yakni antara lain sebagai berikut :

- (a) Dengan terputusnya mata rantai distribusi sembilan bahan pokok (sembako) yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh swasta, selama terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998, koperasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk menggantikan peranan swasta yang menghilang tersebut di dalam mendistribusikan sembako,
- (b) Peran pemerintah untuk memperkuat perekonomian kerakyatan telah mendorong koperasi untuk berperan-aktif di dalam proses pengembangannya, karena koperasi diharapkan mampu memainkan perekonomian nasional tersebut,
- (c) Krisis ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena tingginya inflasi mencapai 87 persen di lain sisi pendapatan yang diperlihatkan melalui kenaikan upah minimum regional (UMR) hanya sebesar 15 persen di tahun 1998. Dari kenyataan tersebut perhatian masyarakat (khususnya bagi anggota yang tidak aktif) terhadap pentingnya koperasi meningkat, karena melalui koperasi

mereka bisa membeli barang dengan pembayaran tertunda (serta terjaminnya pasokan) . dan

- (d) Krisis ekonomi yang menyebabkan besarnya pemutusan hubungan kerja dan penurunan daya beli itu diduga juga mempengaruhi kemampuan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau modal usahanya. Untuk itu, anggotanya selama krisis terjadi memanfaatkan unit simpan-pinjam untuk mengambil kredit anggota.

Tabel 3.4.

Omzet Usaha Koperasi di Bandung dan Denpasar, 1994 dan 1998

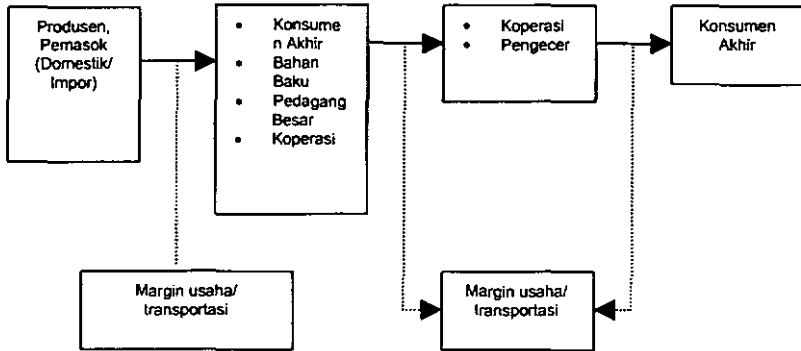
NO	KETERANGAN	SAMPEL	OMZET (Rp. Juta)	PERUBAHAN (persen)
I.	BANDUNG	4		
01	1994		205	100,00
02	1998		648	316,10
03	Pertumbuhan per Tahun			54,02
II.	DENPASAR	3		
01	1994		806	100,00
02	1998		4.203	521,46
03	Pertumbuhan Per Tahun			105,36

Sumber : Diolah dari Data Primer

Dalam proses pendistribusiannya, margin yang diperoleh koperasi pada dasarnya secara relatif cukup baik, yakni antara 6persen hingga 13 persen, walau masih dalam batas-batas keuntungan. Sebagai misal, mata rantai distribusi dari dan ke koperasi di 2 (dua) daerah penelitian – yakni Bandung di Jawa Barat dan Denpasar di Bali komoditas beras, gula dan minyak goreng dapat ditunjukkan melalui saluran distribusi seperti pada Bagan 3.1. dan Bagan 3.2. berikut ini,

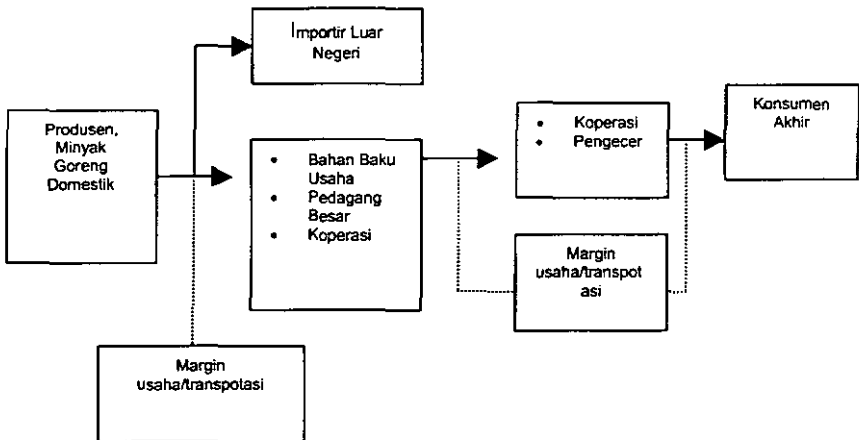
Bagan 3.1.

Matarantai Distribusi Beras, Gula



Bagan 3.2.

Matarantai Distribusi Minyak Goreng



Sumber asal pendistribusian beras dan gula dan beras pada dasarnya dari produsen domestik maupun pemasok dari luar negeri. Seperti diketahui bahwa Indonesia masih melakukan impor gula dan beras dari beberapa negara, seperti Australia, Thailand, India maupun Pakistan. Sebaliknya terhadap minyak goreng, produsen domestik tidak hanya memasok kebutuhan minyak goreng domestik, namun melakukan ekspor ke luar negeri.

Margin yang diperoleh pada dasarnya sama antara usaha usaha di bidang beras, gula dan minyak goreng. Margin tersebut berasal dari proses distribusi dari produsen ke pedagang besar atau koperasi (skala besar), kemudian dari pedagang besar ke pengecer/koperasi, dan selanjutnya dari pengecer/koperasi ke konsumen akhir, seperti rumah-tangga rumah-tangga penduduk (lihat kembali Bagan 3.1. dan Bagan 3.2 di halaman sebelumnya).

Margin tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan harga di antara matarantai para produsen/pemasok, kemudian pedagang besar/koperasi (skala besar), selanjutnya pengecer/koperasi ke konsumen akhir. Perbedaan tersebut bisa terjadi oleh karena adanya biaya-biaya angkutan dari tempat asal ke tempat tujuan dan keuntungan usaha.

Perbedaan harga beras, minyak goreng dan gula pada dasarnya secara relatif tidak terlalu variatif. Seperti terlihat pada Tabel 3.5. di halaman berikut ini, variasi harga beras di tingkat produsen berkisar 5 s/d 10 persen. Selain itu, juga terlihat variasi yang sama di tingkat distributor..Namun variasi di tingkat koperasi justru cukup tinggi, yakni berkisar antara 6 s/d 13 persen. Dari sini dapat diperhatikan bahwa margin yang besar didapat di tingkat koperasi. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa :

- (a) Meskipun koperasi menerima margin yang lebih besar, akan tetapi keuntungan tersebut akan didistribusikan kembali kepada anggotanya melalui rapat seluruh anggota di dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan
- (b) Besarnya margin yang diperoleh tersebut didasarkan pertimbangan bahwa pembelian yang dilakukan oleh anggota lebih banyak bersifat kredit, sehingga penetapan harga yang lebih tinggi tersebut dapat diterima oleh anggota demi untuk menjaga kenaikan harga di masa mendatang.

Sementara itu, variasi harga di tingkat produsen, distributor dan koperasi tidak begitu besar, yakni antara 5 s/d 10 persen. Namun yang menarik untuk diamati adalah variasi harga gula di tingkat produsen, yakni berkisar antara 4 s/d 12 persen. Harga di tingkat produsen untuk

gula impor mencapai 12 persen, sedangkan harga gula di tingkat produsen untuk gula domestik sebesar 4 persen.

Besarnya variasi gula impor tersebut pada dasarnya disebabkan oleh biaya angkutan dari industri gula di luar negeri ke dalam negeri. Impor gula selama ini berasal dari Australia, Thailand, Korea Selatan dan negara-Asia lainnya.

Tabel 3.5.

Perubahan Harga Beras, Gula dan Minyak Goreng di Berbagai Pelaku Tataniaga Per Satuan Kilogram (Rupiah)

NO	KOMO-DITAS	PRDUSEN		DISTRIBUTOR		KOPERASI	
		Harga	Persen	Harga	Persen	Harga	persen
I	BERAS						
1.1.	Kualitas I	3.000-3.300	10,00	3.400-3.600	5,88	3.700-4.000	8,11
1.2.	Kualitas II	2.400-2.600	8,33	2.800-3.100	10,7	3.100-3.500	12,90
1.3.	Kualitas III	2.100-2.300	10,00	2.400-2.600	8,33	2.500-2.800	12,00
1.4.	Kualitas IV	2.000-2.100	5,00	2.200-2.300	4,55	2.350-2.500	6,38
II	M. GORENG						
2.1.	Kuning	2.500-2.700	8,00	2.850-3.000	5,26	3.000-3.250	8,33
2.2.	Putih	2.800-3.000	7,14	3.100-3.400	9,68	3.400-3.700	8,82
III	GULA						
3.1.	Impor	1.250-1.400	12,00	2.000-2.100	5,00	2.200-2.400	9,09
3.2.	Domestik	2.500-2.600	4,00	2.100-2.250	7,14	2.300-2.500	8,70

Sumber : Diolah dari Data Primer

Akibat krisis ekonomi, dimana nilai rupiah mengalami depresiasi di tahun 1998, hal ini pada gilirannya telah menghancurkan proses produksi gula di dalam negeri. Meskipun nilai tukar dewasa ini mulai membaik¹⁰, namun biaya produksi gula selama ini masih relatif lebih mahal dibanding biaya produksi di tingkat internasional. Sebagai misal, perkiraan biaya produksi di tingkat internasional mencapai Rp.1.250,- s/d Rp. 1.400,- per kilogramnya, sementara itu biaya produksi di dalam negeri mencapai Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.600,-

Kenyataan di atas tentunya juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi usaha-usaha penanaman modal di bidang

¹⁰ Kompas, Sabtu, 27 November, 1999 menggambarkan bahwa nilai kurs per dollar Amerika Serikat mencapai Rp. 7.110,-

perkebunan tebu dan pabrik gula di masa mendatang. Artinya, alasan terhadap pertimbangan ketegangan diplomatik antara pemerintahan Australia dan Indonesia harus dipikir masak-masak, jangan pertimbangan politik saja. Namun juga harus diperhatikan perimbangan sosial dan ekonomi. Seperti diperlihatkan dengan kenyataan biaya produksi di tingkat domestik dan internasional, nampak jelas bahwa biaya produksi di dalam negeri mencapai 2 (dua) kali lipat dibanding biaya produksi di tingkat internasional. Atas dasar itulah petani tebu (termasuk industri gula) domestik memohon pemerintah untuk menaikkan pajak impor gula sebesar 110 persen¹¹.

Dalam kaitannya dengan distribusi gula tersebut, importir (distributor) gula cenderung memperoleh nilai tambah yang besar. Tabel 3.6. di halaman berikut ini memperlihatkan bahwa sumbangan nilai tambah distributor untuk perdagangan gula yang diimpor, berkisar antara 29 s/d 34 persen. Di lain sisi, nilai tambah yang diraih oleh koperasi untuk perdagangan gula yang diimpor, hanya berkisar antara 9,09 s/d 12,67 persen. Di sisi lain, produsen luar negeri yang mengekspor gula ke Indonesia, diperkirakan memperoleh nilai tambah berkisar antara 56,82 s/d 58,33 persen.

Sebaliknya, distributor di dalam negeri yang memperdagangkan produksi gula domestik terpaksa harus disubsidi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar gula yang dihasilkan oleh produsen domestik bisa disalurkan ke pasar dengan tingkat harga yang relatif tidak jauh berbeda dibanding harga gula impor. Subsidi dari pemerintah berkisar antara 14,00 s/d 17,39 persen. Atas subsidi yang dilakukan pemerintah tersebut, diperkirakan koperasi yang memperdagangkan gula produksi domestik itu akan mampu meraih nilai tambah di dalam total sumbangsinya berkisar antara 8,69 s/d 10,00 persen (hal ini lebih rendah nilai tambahnya apabila dibandingkan dengan koperasi yang memperdagangkan gula impor yang mencapai 9,09 persen hingga 12,67 persen).

Sementara itu, distribusi minyak goreng juga mengalami gangguan cukup besar. Akibat kurs dimana rupiah terdepresiasi terhadap dollar Amerika Serikat, produsen domestik menikmati keuntungan yang cukup besar dengan melakukan ekspor minyak kelapa sawit (*crude palm oil*, CPO). Karena harga di luar negeri yang sangat menarik, mereka melepas stok di dalam negeri untuk meraih kesempatan keuntungan yang besar. Implikasinya adalah bahwa stok di dalam negeri terbatas sekali dan permintaan tetap sedia kala,

¹¹ *Kompas*, Minggu, 28 November, 1999

demand exceeds its supply. Harga minyak goreng di dalam negeri sempat melambung tinggi.

Tabel 3.6.

Besarnya Sumbangan Nilai Tambah pada Pelaku Tataniaga (persen)

NO	KOMODITAS	PRODUSEN		DISTRIBUTOR		KOPERASI	
		Harga Rendah (A)	Harga Tinggi (B)	Harga Rendah (A)	Harga Tinggi (B)	Harga Rendah (A)	Harga Tinggi (B)
I	BERAS						
1.1.	Kualitas I	81,08	82,50	10,81	10,00	8,11	7,50
1.2	Kualitas II	77,42	74,29	12,90	14,29	9,68	11,42
1.3	Kualitas III	84,00	82,14	12,00	10,71	4,00	7,15
1.4	Kualitas IV	85,11	84,00	8,51	8,00	6,38	8,00
II	MINYAK GORENG						
2.1	Kuning	80,00	83,08	11,66	9,23	8,34	7,69
2.2	Putih	82,35	81,08	8,82	10,81	8,83	8,11
III	GULA						
3.1	Impor	56,82	58,33	34,09	29,00	9,09	12,67
3.2	Domestik	108,70	104,00	(17,39)	(14,00)	8,69	10,00

Sumber : Diolah dari Data Primer dan Berbagai Sumber
(..) = subsidi pemerintah.

Karena minyak goreng adalah salah satu dari sembilan bahan pokok (SEMPAKO), kenaikan harga itu tentunya akan mempengaruhi perubahan pengeluaran penduduk, yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi kegoncangan sosial-ekonomi. Atas dasar itulah, pemerintahan Kabinet Habibie, melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag), Dr. Ir. Rahardi Ramelan, memberlakukan penetapan pajak ekspor CPO mencapai 40 persen.

Sumbangan nilai tambah yang diberikan produsen pada dasarnya berkisar antara 80,00 s/d 83,08 persen untuk jenis minyak goreng berkualitas lebih rendah (berwarna kuning), sebaliknya untuk minyak goreng yang berkualitas lebih tinggi (berwarna putih) berkisar antara 81,08 s/d 82,35 persen. Dalam hal ini peran koperasi di dalam memberikan nilai tambah terhadap harga persatuan berkisar antara 7,69 s/d 8,83 persen.

Sementara itu, koperasi memberikan cukup besar sumbangan terhadap nilai tambah beras dibanding di minyak goreng. Tabel 3.6. di

halaman sebelumnya menggambarkan sumbangan nilai tambah tersebut berkisar 7,50 s/d 11,42 persen. Nilai tambah terbesar terlihat pada jenis beras berkualitas II.

3.4. Kaitan Koperasi dalam Pasokan dan Distribusi SEMBAKO terhadap Total Perdagangan SEMBAKO

Seberapa jauh unit usaha SEMBAKO memberikan kontribusi terhadap total usaha koperasi selama ini ? Bagian (sub-bab) ini pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Dari 7 (tujuh) koperasi yang diamati di dalam penelitian ini di 2 (dua) kota, yakni Bandung dan Denpasar, ternyata unit usaha SEMBAKO memberikan kontribusi terhadap penjualannya pada urutan ketiga.

Urutan pertama ditunjukkan oleh besarnya omzet (penjualan) unit simpan-pinjam, dimana omzetnya meningkat pesat selama kurun waktu 1994-1998, yakni mencapai hampir 4 (empat) kali lipat. Sedangkan pertumbuhan omzet unit simpan-pinjam pertahunnya telah mencapai 67,95 persen.

Perkembangan omzet usaha unit SEMBAKO yang menempatkan pada urutan ketiga, justru dalam kurun waktu 1994-1998 mengalami perkembangan yang mencapai lebih dari 8 (delapan) kali lipat, yakni dari Rp. 121 juta di tahun 1994, menjadi Rp. 978 juta di tahun 1998. Dengan memperhatikan kejadian tadi, pertumbuhan omzet SEMBAKO setiap tahunnya selama kurun waktu 1994-1998 adalah sebesar 177,07 persen.

Apabila ditilik berdasarkan lokasi penelitian, proporsi omzet SEMBAKO di Denpasar menunjukkan angka yang lebih besar dibanding Bandung. Omzet SEMBAKO di Denpasar sebesar Rp. 106 juta di tahun 1994 dan kemudian meningkat menjadi Rp. 650 juta di tahun 1998, atau ada kenaikan sebesar 6 (enam) kali lipat.

Sementara itu, meskipun omzet SEMBAKO di Bandung relatif lebih kecil dibanding Denpasar, akan tetapi omzet meningkat relatif besar. Seperti terlihat pada Tabel 3.7. di bawah ini, omzet usaha di tahun 1994 baru sebesar Rp. 15 juta, akan tetapi pada tahun 1998 telah meningkat menjadi Rp. 328 juta, atau terdapat kenaikan hampir sebesar 23 kali lipat, atau terdapat pertumbuhan pertahunnya sebesar 521,67 persen.

Kenyataan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- (a) Proporsi unit usaha simpan-pinjam masih relatif dominan di dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, baik untuk kepentingan

kehidupan sehari-hari maupun untuk kebutuhan modal usaha anggotanya,

- (b) Meskipun unit usaha SEMBAKO masih relatif kecil di dalam kontribusinya terhadap total nilai usaha, akan tetapi dalam kurun waktu 1994-1998 mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan
- (c) Prospek perkembangan unit usaha SEMBAKO diduga akan semakin membaik dengan kepercayaan pemerintah akan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui perkuatan koperasi.

Tabel 3.7.

Perkembangan Omzet Usaha Sampel Koperasi, 1994 dan 1998
Menurut Lokasi Penelitian, Bandung dan Denpasar

NO	JENIS USAHA	OMZET USAHA (Rp. Juta)			
		BANDUNG		DENPASAR	
		1994	1998	1994	1998
01	Simpan-pinjam	145	169	429	1.965
02	Non-sembaka	41	139	250	546
03	Sembako	15	328	106	650
04	Lainnya	4	12	21	1.042
	JUMLAH	205	648	806	4.203

Sumber : Diolah dari Data Primer

Di dalam proses pendistribusian SEMBAKO, seringkali koperasi dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak terkait dengan masalah pendistribusian. Justru karena persoalan pengembangan unit usaha lainnya maupun kiris ekonomi menjadikan koperasi itu mengalami berbagai kendala. Untuk itu, 2 (dua) contoh akan diberikan disini dimana terdapat koperasi yang berusaha mengembangkan unit usaha *property*. Pada masa-masa sebelum terjadi krisis, mereka memproyeksikan pembangunan *property* akan menguntungkan, namun karena pembangunan belum selesai, selanjutnya ditengah dihadap badai krisis, implikasinya mereka dihadapkan pada keterbatasan modal.

3.4.1. Kasus Koperasi di Bandung

Kenyataan di atas juga dialami oleh Koperasi Kencana di Bandung¹². Usaha untuk memberikan lokasi kegiatan anggotanya, Koperasi Kencana mempercayakan kepada pengembang (*developer*) untuk mengambil 2 (dua) lantai dari bangunan 10 tingkat. Untuk itu, Koperasi Kencana menyerahkan dana investasi kepada pengembang.

Akan tetapi selagi proses pembangunan dilakukan, terjadi krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi dan politik. Implikasinya adalah harga-harga bahan bangunan melambung tinggi yang berakibat pada meningkatnya anggaran pembangunan. Implikasinya proses pembangunan terbengkalai. Akibatnya lebih jauh, modal kerja Koperasi Kencana tertanam di bangunan belum selesai, sementara itu, anggota koperasi masih berusaha di kakilima (K-5).

Kenyataan di atas mempersulit bagi koperasi untuk mendistribusikan SEMBAKO ke anggota-anggotanya karena masalah penggudangan yang dihadapi oleh para anggota tersebut. Meskipun Koperasi Kencana telah mampu melakukan negosiasi untuk mendapatkan SEMBAKO yang relatif murah dari produsen maupun distributor, akan tetapi karena masalah penggudangan pada anggotanya belum dapat dilaksanakan, akibatnya Koperasi Kencana harus menampung SEMBAKO di gudangnya. Di sisi lain, karena ruang gudangnya sangat terbatas, maka Koperasi Kencana harus menyewa gudang di tempat lain. Singkatnya, Koperasi Kencana harus mengeluarkan dana ekstra untuk penggudangan. Tambahan biaya ini tentunya akan membebani biaya penjualan SEMBAKO kepada anggota-anggotanya.

3.4.2. Kasus Koperasi di Denpasar

Di dalam pemenuhan kebutuhan SEMBAKO, beberapa koperasi di dalam dan sekitar kota Denpasar, Bali, sebelumnya membentuk hubungan usaha dengan JUK (Jaringan Usaha Koperasi) yang berada di kota Denpasar¹³. Keberadaan JUK ini diharapkan mampu memasok kebutuhan koperasi-koperasi di Bali dengan tingkat harga yang relatif rendah. Hal ini diharapkan beberapa koperasi nantinya mampu mendistribusikan kebutuhan anggotanya dengan penetapan harga yang relatif terjangkau.

¹² Wawancara dengan Sekretaris Koperasi Kencana, Mahfud Syaifuddin, SE, di Bandung, Jawa Barat, bulan September 1999.

¹³ Wawancara dengan Ketua Koperasi Karyawan Perikanan Samodra, Drs. Soetomo H. P., BSc., di Benoa, kabupaten Badung, Bali, bulan November 1999.

Namun karena kegiatan usaha JUK yang melebar tidak hanya pada SEMBAKO, mengarah pada bangunan (*property*), sebagian besar modal kerjanya tertanam pada investasi bangunan ini. Sementara investasi terhadap bangunan belum selesai, terjadi krisismoneterr yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi dan politik, maka modal kerja yang tertanam itu belum bisa kembali. Sementara itu, harga-harga melambung tinggi sehingga perlu revisi biaya investasi. Pada saat revisi dilakukan untuk menambah modal, dana yang tersedia telah terserap ke dalam bangunan yang belum selesai tersebut.

Implikasi dari kegiatan tersebut, JUK sudah tidak mempunyai modal kerja lagi untuk bidang pengembangan SEMBAKO. Singkatnya, beberapa koperasi tersebut harus melakukan negosiasi kembali untuk memperoleh pasokan SEMBAKO ke perusahaan lain. Karena pasokan dari JUK yang dahulunya relatif lebih murah, kini beberapa koperasi tersebut harus membeli SEMBAKO dari perusahaan lain yang relatif lebih mahal. Akibatnya, harga yang ditawarkan oleh pengurus KPPS kepada anggota tentunya akan lebih mahal.

Dengan tidak lagi melakukan hubungan dengan JUK (Jaringan Usaha Koperasi), beberapa koperasi tersebut melakukan pembelian-pembelian produknya untuk disalurkan kepada anggota-anggotanya dengan cara tunai – baik untuk memenuhi kebutuhan beras, minyak goreng maupun gula.. Alasan harus dibeli secara tunai juga karena adanya ketidak-pastian perkembangan harga yang sangat bervariasi dewasa ini. Distributor yang memasok kebutuhan koperasi itupun mengharapkan pembayaran secara tunai, agar mereka mampu dengan waktu yang relatif singkat mengambil barang lainnya dari pabrik (produsen). Sebagai misal,

- (a) Harga beras kualitas IV yang dahulunya hanya Rp. 700,- per kilogramnya, kini telah meningkat menjadi Rp. 2.400,-, yakni meningkat mencapai 3,43 kali lipat. Dengan kenyataan ini, apabila distributor memasok beras kepada koperasi dengan cara kredit, maka dengan kenaikan harga tersebut, tentunya distributor tidak bisa lagi membeli beras ke produsen dengan jumlah kilogram yang sama, dan
- (b) Dengan cara penjualan secara tunai, distributor akan bisa menggunakan hasil penjualan untuk berspekulasi terhadap barang lainnya.

Umumnya pasokan terhadap kebutuhan SEMBAKO koperasi yang diteliti ini dari luar kota, baik di Bandung, Jawa Barat, maupun Denpasar, Bali yang relatif tidak terlalu jauh. Atas dasar itu, biaya pengangkutan usaha tidak begitu besar membebani harga jual berbagai

produk kepada anggota maupun bukan anggota. Khususnya beras, koperasi masih bisa melakukan pembelian langsung dari para petani, tanpa melalui distributor. Pembelian langsung dari petani dilakukan tidak setiap hari, tergantung pada musim panen. Sebaliknya kebutuhan minyak goreng dan gula harus didapatkan dari distributor maupun pabrik langsung.

3.5. Kontribusi Pasokan dan Distribusi SEMBAKO terhadap Total Perdagangan berbagai Komoditas Koperasi

Umumnya kontribusi perdagangan SEMBAKO meningkat selama kurun waktu 1994-1998, baik sampel koperasi yang berada di Bandung maupun yang berada di Denpasar. Seperti terlihat pada Tabel 3.8., kontribusi perdagangan SEMBAKO pada 4 (empat) sampel koperasi di Bandung meningkat dari 7,32 persen dari total perdagangan yang dilakukan oleh keseluruhan unit kegiatan di tahun 1994, menjadi 50,62 persen di tahun 1998.

Sementara itu di Denpasar, kontribusi 3 (tiga) sampel koperasi meningkat dari 13,15 persen di tahun 1994, kemudian menjadi 15,47 persen di tahun 1998. Peningkatan tersebut tidak terlalu besar, karena salah satu koperasi yang diteliti di Denpasar melakukan investasi pembelian kapal yang cukup besar. Jadi walaupun kontribusi koperasi terhadap perdagangan secara absolut cukup besar, akan secara relatif perkembangannya tidak terlalu nampak besar.

Tabel 3.8.

Kontribusi Koperasi Terhadap Produksi dan Perdagangan, 1994 dan 1998 (persen)

NO	KETERANGAN	BANDUNG		DENPASAR	
		1994	1998	1994	1998
01	Simpan Pinjam	70,73	26,08	53,23	46,75
02	Perdagangan Non SEMBAKO	20,00	21,45	31,02	12,99
03	Perdagangan SEMBAKO	7,32	50,62	13,15	15,47
04	Lainnya	1,95	1,85	2,61	24,79
	JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Data Primer

Sementara itu, dengan memperhatikan kenaikan selama kurun waktu 1994-1998, terlihat bahwa peningkatan perdagangan SEMBAKO di Bandung mencapai hampir 22 kali lipat, dan kenyataan di Denpasar hanya meningkat lebih dari 6 (enam) kali lipat selama kurun waktu tersebut. Hal ini dapat diperlihatkan pada Tabel 3.9. berikut ini. Hal ini tentunya dapat diinterpretasikan bahwa :

- (a) Meskipun secara absolut proporsi kontribusi perdagangan SEMBAKO masih rendah, akan tetapi secara relatif terjadi kenaikan yang cukup pesat selama kurun waktu 1994-1998, dan
- (b) Besarnya kenaikan unit usaha lainnya di Denpasar, Bali, sangat terkait dengan pembelian kapal penangkapan ikan oleh koperasi. Disini terlihat bahwa koperasi tidak hanya bergerak dalam unit usaha SEMBAKO maupun simpan-pinjam, akan tetapi unit usaha penangkapan ikan akan menjadi menarik di masa mendatang.

Tabel 3.9.

Peningkatan Produksi Unit Usaha Koperasi, 1994 dan 1998 (Kelipatan)

NO	KETERANGAN	BANDUNG	DENPASAR
01	Simpan Pinjam	1,17	4,58
02	Perdagangan Non SEMBAKO	3,39	2,18
03	Perdagangan SEMBAKO	21,87	6,13
04	Lainnya	3,00	49,62
	JUMLAH	3,16	5,21

Sumber : Diolah dari Data Primer

3.6. Kesimpulan

Peran koperasi diduga akan semakin besar di masa mendatang. Dengan kegagalan model pembangunan yang mengarah pada pemacuan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor sebagai lokomotif (*export-led growth*). Untuk itu, semenjak akhir 1997, pemerintah telah mencoba mengalihkan model pembangunan, dari model yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang pesat kepada model pembangunan yang mengandalkan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat (*community-based development*) dengan orientasi kepada kepentingan kebutuhan utama di dalam negeri (*domestic needed-consumption*).

Meskipun dalam situasi krisis ekonomi dewasa ini masih terasa dan banyak kritikan terhadap perkembangan koperasi, namun koperasi yang diteliti mampu meningkatkan modal usaha. Sementara itu, perkembangan omzet koperasi, yang diamati, pada umumnya juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi terjadi, dan bahkan peningkatannya cenderung lebih tinggi dibanding modal usaha.

Dalam kaitannya dengan proses distribusi, koperasi mampu memperoleh margin sebesar 6 persen hingga 12 persen, sementara itu margin yang diperoleh distributor cenderung lebih kecil dibanding koperasi itu sendiri, yakni berkisar antara 5 persen hingga 10 persen. Di lain sisi, margin yang diperoleh produsen berkisar antara 4 persen hingga 12 persen.

Secara relatif, proporsi kontribusi omzet terbesar dari unit usaha koperasi yang diteliti adalah unit usaha simpan pinjam. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa unit usaha koperasi pada awalnya adalah simpan-pinjam. Sementara itu, omzet unit SEMBAKO mengalami peningkatan yang signifikan selama krisis terjadi, tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S., 1998, **Teori dan Kebijakan Pembangunan** (Jakarta,CIDES)
- Baker, J. ., 1997, **The Mondragon Model : A New Pathway for the Twenty First Century**, di dalam F. Hesselbein, at.al., **Organization of the Future**
- Balitbang Koperasi dan Pengusaha Kecil, 1997, **Profil Koperasi : Nuansa Menuju Masa Depan** (Jakarta)
- Balitbang Koperasi dan Pengusaha Kecil, 1997, **Profil Koperasi : Nuansa Menuju Masa Depan** (Jakarta)
- Bazaraa, M. S., dan J. J. Jarvis, 1977, **Linear Programming and Network Flows** (London : John Wiley & Sons)
- Darwin, ed., 1998, **Penanganan Pasokan dan Distribusi SEMBAKO** (Jakarta : PEP-LIPI)
- Hatta, M., 1957, **Sambutan pada Musyawarah Nasional Pembangunan** (Jakarta)
- Hikam, M. A. S., 1999, **Demokrasi dan Civil Society** (Jakarta : Yayasan Obor).
- Maddala, G. S., 1988, **Introduction to Econometrics** (New York : Macmillan Publishing Coy)
- Pindyk, R. S., dan D. L. Rubinfeld, 1981, **Econometric Models and Economic Forecasts** (London, McGraw-Hill International Book Coy)
- Shigetomi, S., 1998, **Cooperation and Community in Rural Thailand : An Organizational Analysis of Participatory Rural Development** (Tokyo : Institute of Developing Economies)
- Susanto, H., dan Darwin (eds.), 1998, **Refleksi 1997 dan Ramalan 1998** (Jakarta : PEP-LIPI, 16 dan 17 Februari)
- Susanto, H., et., al., 1999, **Kesejahteraan Buruh dalam Masa Krisis Ekonomi** (Jakarta : PEP-LIPI)

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI DALAM DISTRIBUSI SEMBAKO

Oleh: Endang Sri Soesilowati

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI DALAM DISTRIBUSI SEMBAKO

Oleh: Endang Sri Soesilowati

4.1. Pendahuluan

Pada umumnya, koperasi didirikan sebagai sarana bagi rakyat untuk usaha gotong-royong dalam penyediaan dana dengan kredit lunak (simpan pinjam). Pada perkembangan selanjutnya, koperasi sebagai institusi ekonomi masyarakat kemudian memperluas usahanya dengan juga melakukan usaha perdagangan, disebut dengan koperasi serba usaha.

Sembako, terutama beras, gula pasir dan minyak goreng, merupakan suatu kebutuhan yang paling dasar bagi tiap anggota koperasi. Oleh karena itu, sangatlah wajar bila usaha perdagangan yang dilakukanpun bermula dari ketiga komoditas tersebut. Untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak tersebut, maka kemudian Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi pendirian koperasi yang bergerak dalam pengadaan dan distribusi sembako ini.

Namun demikian, pada masa krisis pada tahun 1997 yang lalu koperasi yang seyogyanya diberikan kemudahan untuk memperoleh pasokan ketiga kebutuhan utama tersebut, ternyata juga tidak mampu bersaing dengan para pengusaha besar dengan modal berkecukupan dalam mendapatkan barang. Bahkan beberapa koperasi tertimpa kerugian pada saat dumping gula dan minyak goreng, di mana harga beli yang konon telah disubsidi, kemudian diikuti dengan merosotnya harga pasar.¹⁴

Latar belakang ketidak mampuan koperasi bersaing dengan swasta sebenarnya merupakan masalah klasik yang melekat pada institusi koperasi. Rendahnya daya saing koperasi terhadap usaha swasta hanya merupakan resultante dari berbagai kelemahan koperasi yang tentunya meliputi bidang sumber daya manusia, sumber daya kapital/modal, dan iklim berusaha koperasi.

¹⁴ Hasil wawancara mendalam dengan pengurus koperasi yang diteliti di daerah penelitian Bandung

Berdasarkan pada keadaan tersebut di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji beberapa upaya pemberdayaan koperasi pada umumnya yang sekaligus menjadi syarat untuk peningkatan peran koperasi dalam penyediaan dan pendistribusian tiga komoditi sembako. Dalam upaya peningkatan peranan koperasi tersebut dilihat dari sudut pandang dua pihak yang terkait langsung dengan usaha ini, yaitu dari sudut pandang pengurus koperasi dan dari sudut pandang masyarakat sekitar koperasi (utamanya anggota koperasi yang bersangkutan).

Melalui pemahaman-pemahaman dari berbagai sumber informasi terutama kedua belah pihak yaitu koperasi sebagai suatu institusi dan masyarakat sebagai pengguna institusi diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas sejauh mana peran koperasi tersebut dapat dan harus ditingkatkan.

4. 2. Aspirasi dari Pengurus Koperasi

4. 2. 1. Aspirasi Pengurus Koperasi Terhadap Fungsi Koperasi

Koperasi pada umumnya didirikan oleh beberapa orang (masyarakat) yang peduli dengan kesulitan ekonomi masyarakat sekitarnya. Tujuan utama dan pertama dari pendirian koperasi tersebut adalah dapat memberikan bantuan keuangan anggotanya dalam bentuk simpan pinjam dengan persyaratan yang ringan. Seiring dengan perkembangan jumlah anggota dan perkembangan jumlah modal di masing-masing koperasi, sebagai upaya untuk pengembangan usaha umumnya koperasi kemudian juga menambah atau memperluas usahanya dalam perdagangan. Dalam usaha perdagangan tersebut, hampir selalu menyediakan tiga komoditas utama sembako yaitu beras, gula dan minyak goreng.

Dari beberapa koperasi yang diamati di dua daerah penelitian Bandung dan Denpasar ternyata omzet usaha koperasi selalu meningkat dari tahun ke tahun, dimana omzet Sembako justru menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dan berbanding terbalik (di Denpasar peningkatan omzet usaha lainnya lebih tinggi daripada di Bandung, tetapi peningkatan omzet Sembakonya di Bandung yang lebih tinggi). Selama 1994-1998 peningkatan omzet di masing-masing yakni, 5 kali lipat di Denpasar berbanding dengan 3 kali lipat di Bandung dalam peningkatan omzet usaha, sementara itu dalam omzet sembako untuk kurun waktu yang sama di Bandung menunjukkan peningkatan sebesar 23 kali lipat dibandingkan dengan Denpasar yang hanya 6 kali lipat (lihat tulisan Peranan Koperasi dalam Pasokan dan Distribusi Sembako oleh Hari Susanto).

Pada waktu krisis (khususnya sejak awal 1998) penambahan jumlah koperasi juga meningkat, di mana pendirian koperasi kini tidak lagi dimulai dengan simpan pinjam tetapi koperasi banyak bermunculan juga untuk penyaluran sembako, sehingga di setiap koperasi hampir selalu ada penyaluran sembako (khususnya beras, gula dan minyak goreng). Munculnya koperasi-koperasi karbitan ini tidak lain sebagai usaha manipulasi sebagian kelompok masyarakat untuk memperoleh fasilitas subsidi yang diharapkan menjadi ladang keuntungan bagi mereka. Keberadaan koperasi karbitan ini berakhir pula seiring dengan teratasinya krisis sembako pada akhir 1998.¹⁵

Pada umumnya tujuan atau keuntungan ikut serta dalam wadah koperasi adalah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan sebagai berikut:

- mendapatkan pinjaman (dana) dengan persyaratan dan biaya ringan
- mendapatkan harga barang yang lebih murah
- mendapatkan (jaminan ketersediaan) sembako (dan non sembako) bagi masyarakat sekitar
- mendapatkan cara pembayaran untuk kebutuhan sembako (non sembako) secara kredit

Beberapa koperasi yang didirikan dengan maksud membantu pengadaan dan distribusi sembako tersebut juga mengharapkan pemerintah, utamanya pada waktu krisis ekonomi, dapat memberikan kemudahan perolehan pasokan sembako bagi koperasi dalam bentuk pinjaman modal atau konsinyasi, namun tetap tidak pernah terjadi. Dari hasil wawancara mendalam terhadap koperasi baik yang sudah maju maupun yang belum maju (dalam arti jumlah anggota dan modal) ditemukan bahwa koperasi karena keterbatasan modal selalu dikalahkan oleh pihak swasta yang natabene mempunyai modal yang lebih besar. Koperasi sampel di Bandung telah mencoba menghimpun modal untuk membeli stock sembako di saat krisis (1998), namun kenyataannya pihak Dolog memecah-mecah tempat pengambilan stock sembako pada banyak tempat, sehingga biaya transport menjadi mahal dan kembali lagi koperasi kalah bersaing dalam harga penjualan dengan pihak swasta.

Dinyatakan oleh beberapa pengurus koperasi bahwa untuk mendapatkan akses ke produsen agar mendapatkan harga murah,

¹⁵ seperti dikemukakan oleh nara sumber Kanwil Koperasi Kodya Bandung, lihat pula data perkembangan koperasi yang melonjak pada tahun 1998 di Bandung.

biasanya harus membeli dalam jumlah/kuantitas yang besar, padahal kemampuan modal (daya beli) koperasi kurang.

Untuk komoditi beras dan gula hambatan terjadi, karena pengambilan dari pemasok berpindah-pindah, serta jatah pengambilan dibagi-bagi, sehingga ongkos pengangkutan menjadi lebih mahal. Maka untuk pengadaan gula ini lebih murah beli langsung ke pasar (pedagang besar) dan beras langsung ke petani atau pedagang di desa-desa. Tidaklah mengherankan, bila harga jual dari koperasi tidak selalu dapat ditekan menjadi di bawah harga pasar.

Sewaktu mendapatkan subsidi dari pemerintah terhadap minyak goreng misalnya, perhitungan dari harga beli saat itu dapat memberi keuntungan bagi koperasi. Tapi kemudian ternyata swasta melakukan dumping dengan menjual pada harga yang lebih murah dari harga beli koperasi sehingga koperasi tidak mampu untuk bersaing bahkan merugi.

Dalam soal harga, nampaknya koperasi tidak mampu berperan banyak bagi keuntungan anggotanya. Namun demikian, sistem distribusi dan cara pembayaran rupanya mampu menjadi daya tarik bagi anggota (khususnya anggota koperasi) masyarakat sekitar.

Pendistribusian sembako dari koperasi diutamakan untuk anggotanya (terutama di saat krisis) dengan cara pemberian jatah pada anggota sesuai dengan pengajuan dari mereka, dan juga potongan harga khusus maupun cara pembayaran yang berbeda-beda terhadap anggota.

Misalnya, gula: koperasi pasar memberikan harga kepada pedagang (anggota) Rp.1.900,- per kg, tapi ke konsumen langsung Rp.2.100. Disamping itu, anggota bisa berbelanja ke koperasi secara kontan maupun kredit. Untuk mereka, kebutuhan sembako (beras, gula, minyak goreng dan terigu) dipenuhi untuk satu bulan, yang bisa dibayarkan pada bulan berikutnya (atau juga dengan penyeteroran hasil tani/ternak)

4.2.2. Aspirasi Pengurus Koperasi Terhadap Upaya peningkatan Fungsi Koperasi

Memahami kendala-kendala yang dihadapi koperasi dalam kelancaran usahanya, maka berbagai upaya kiranya perlu dilakukan. Untuk itu, para pengurus koperasi mengharapkan dapat diupayakannya hal-hal berikut:

1. Dari segi permodalan

Peminjaman kredit ke Bank dengan bunga ringan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan untuk mengembangkan koperasi yang bersangkutan.

2. Dari segi pengelolaan

- Kepengurusannya harus mempunyai jiwa wiraswasta dan ada wawasan kekoperasian.
- Keanggotaannya harus mempunyai sifat 3 RM → rajin menabung, rajin meminjam dan rajin membayar
- Pembinaan dalam kelembagaan oleh Departemen Koperasi dengan penyuluhan-penyuluhan tentang: fungsi, hak dan kewajiban anggota koperasi.
- Pemerintah harus melakukan proteksi terhadap sumber-sumber pemasok yang ditentukan oleh pemerintah, agar tidak bisa dicampuri (diganggu) oleh pihak-pihak lain. Maka disinipun yang diperlukan adalah SDM yang bermutu.
- Disediakan fasilitas-fasilitas, mengingat koperasi selalu diharapkan dan didengungkan sebagai soko guru perekonomian rakyat.

4. 3. Persepsi Masyarakat (Anggota dan Bukan Anggota) Terhadap Fungsi Koperasi

Sebagai suatu institusi perekonomian kerakyatan, maka masyarakat sangat mengharapkan koperasi mampu untuk selalu menyediakan kebutuhan masyarakatnya (sembako). Hal ini tercermin dari kebanyakan jawaban-jawaban yang diberikan oleh masyarakat sekitar, baik yang menjadi anggota di koperasi yang bersangkutan maupun yang tidak menjadi anggota. Masyarakat pada umumnya menghendaki pasokan sembako di koperasi di mana mereka menjadi anggota selalu tersedia pasokan sembako yang mencukupi. Mereka umumnya mengharapkan bahwa koperasi tidak hanya menjadi tempat meminjam uang dengan bunga rendah dan tempo yang longgar, tetapi juga menjadi tempat yang terbaik (mudah dan murah) dalam penyediaan sembako. Uraian lebih rinci dari persepsi masyarakat terhadap peranan koperasi dan bagaimana seharusnya koperasi berfungsi dengan baik, serta upaya pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan koperasi sebagai pemasok dan distributor sembako dapat dilihat dalam tabel-tabel yang disajikan berikut.

4.3.1. Harapan Masyarakat Terhadap Peran Koperasi dalam Penyediaan Sembako

Persepsi masyarakat terhadap fungsi koperasi diungkapkan lewat harapan masyarakat (anggota dan bukan anggota koperasi) terhadap peranan koperasi tersebut. Dari sini nampak jelas bahwa 100% responden di kedua daerah penelitian (masing-masing 75 orang) baik anggota koperasi maupun bukan anggota memberikan respon yang bervariasi. Namun demikian Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap koperasi yang diharapkan oleh mayoritas responden adalah bahwa koperasi sebagai suatu lembaga yang dapat menyediakan kebutuhan utama (sembako) dengan harga yang murah yang dinyatakan oleh 63,8% responden di Bandung dan 54% responden di Denpasar.

Tabel 4.1.

Persentase Responden Berdasarkan Harapannya Terhadap Peran Koperasi Sebagai Distributor Sembako

Harapan	Bandung	Denpasar
Barang selalu ada	23,8%	36,0%
Harga murah	63,8%	54,0%
Beras tidak hanya untuk anggota	1,3%	0,0%
Boleh beli sedikit	3,8%	0,0%
Bayar dicicil	2,5%	2,0%
Diantar ke anggota	5,0%	8,0%
Total (n)	100,0%(75)	100,0% (75)

Sumber: Data Primer

Masih berkaitan dengan fungsi pemenuhan hajat hidup orang banyak tersebut, sekitar 23,8% dan 36% masing-masing responden Bandung dan Denpasar menyatakan bahwa koperasi harus selalu dapat menyediakan sembako (jangan sampai kehabisan persediaan). Sedangkan jawaban yang lainnya, seperti memberikan fasilitas antar barang ke anggota, dapat dibayar dengan cara cicilan, dan lain-lain secara bervariasi diungkapkan oleh beberapa responden di kedua daerah penelitian.

4.3.2. Aspirasi Masyarakat Terhadap Upaya Koperasi dalam Kelancaran Distribusi Sembako

Masyarakat sekitar juga sangat memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh institusi koperasi dalam perolehan pasokan sembako, yang umumnya menganggap bahwa kesulitan lembaga koperasi terutama adalah bersumber dari dana yang terbatas. Dari 58% (44) responden di Bandung dan 51% (33) responden di Denpasar yang memberikan jawaban terhadap upaya yang dapat dilakukan koperasi untuk memperbaiki kinerjanya dalam penyaluran Sembako menunjukkan kecenderungan yang sama. Dari beberapa upaya yang kiranya mungkin dapat dilakukan oleh koperasi, hal menonjol yang dikemukakan oleh responden adalah dibutuhkannya pengurus koperasi yang tahu lapangan atau cukup profesional dalam menangani pasokan dan distribusi sembako, dinyatakan oleh 25% responden di Bandung dan 21,3% responden di Denpasar. Menjalini kerjasama dengan pihak swasta sebagai pemasok adalah juga hal yang banyak dikemukakan responden, masing-masing 22,7% responden Bandung dan 42,4% responden Denpasar. Sementara itu jenis upaya lainnya, menunjukkan persentase responden yang agak berbeda antara Bandung dan Denpasar (lihat tabel 4.2).

Tabel 4.2.

Persentase Responden Berdasarkan Pendapatnya Terhadap Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Koperasi Untuk Penyediaan Kebutuhan Sembako

Upaya	Bandung	Denpasar
Minta bantuan pemerintah	9,1%	6,1%
Iuran anggota	13,6%	0,0%
Pengurus tahu lapangan/Profesional	25,0%	21,3%
Kerjasama dengan pemasok (swasta)	22,7%	42,4%
Tambahan modal	15,9%	9,1%
Pendekatan terhadap masyarakat	13,6%	0,0%
Fasilitas baik	0,0%	21,2%
Total (n)	100,0% (44)	100,0% (33)

Sumber: Data Primer

Keterangan: n adalah jumlah responden yang menjawab

Upaya lain yang diharapkan oleh responden dapat dilakukan Koperasi adalah penambahan modal dikemukakan oleh 15,9% responden Bandung dan 9,1% responden Denpasar. Penambahan modal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan iuran anggota

seperti dikemukakan oleh 13,6% responden Bandung maupun dengan mencari suntikan modal dari pihak swasta. Meminta bantuan pemerintah yang dalam hal ini juga dapat berarti untuk penambahan modal selain bantuan teknis dikemukakan oleh responden di kedua daerah penelitian, masing-masing 9,1% responden Bandung dan 6,1% responden Denpasar. Sementara itu responden di Denpasar cukup banyak (21,2%) yang menyatakan bahwa koperasi harus menyediakan fasilitas yang lengkap dan baik sebagai upaya untuk dapat meningkatkan peranannya sebagai wadah ekonomi rakyat utamanya untuk keberlangsungan ketersediaan Sembako.

4.3.3. Harapan Masyarakat Terhadap Peranan Pemerintah

Selain upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi, 100% responden Bandung dan 54% responden Denpasar juga memandang perlunya peranan pemerintah dalam menunjang aktivitas koperasi. Anggapan masyarakat terhadap peranan Pemerintah dalam menunjang kegiatan Koperasi utamanya dalam penyediaan sembako adalah sebagai *buffer stock* atau stabilisator harga dan pasokan seperti diungkapkan oleh 43% responden di Bandung dan 21,4% di Denpasar. Selain itu, Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan fasilitas kredit maupun pasokan sembako, seperti diungkapkan oleh responden di Bandung dan Denpasar (39,2% dan 50%). Hal lain yang banyak juga dinyatakan oleh responden adalah bahwa pemerintah harus mampu mengadakan pengawasan dan bimbingannya terhadap koperasi agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti dikemukakan oleh 13,9% responden Bandung dan 28,6% responden Denpasar. Tabel 4.3 menunjukkan jenis-jenis bantuan yang diharapkan dapat diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan fungsi koperasi.

Tabel 4.3.

Persentase Responden Berdasarkan Harapannya Terhadap Bantuan Pemerintah Dalam Pengembangan Peran Koperasi Sebagai Distributor Sembako

Jenis Bantuan	Bandung	Denpasar
Stabilitas harga dan Pasokan	43,0%	21,4%
Terbuka dalam penyaluran dana	3,8%	0,0%
Memberikan kemudahan kredit/bantuan modal	39,2%	50,0%
Pengawasan atau Bimbingan	13,9%	28,6%
Total (n)	100,0% (75)	100,0% (40)

Sumber: data Primer

Keterangan: n adalah jumlah responden yang menjawab

4. 4. Alternatif Pengembangan Fungsi Koperasi

Dari fenomena-fenomena di atas dapat dirumuskan bahwa dari sudut pandang pengurus, kurang berkembangnya koperasi terutama karena kurangnya modal. Hal ini mengakibatkan koperasi tidak mampu membeli pasokan untuk kebutuhan persediaan sembako langsung dari pabrik (khususnya minyak goreng dan gula). Demikian pula halnya untuk pembelian beras, apabila mereka terpaksa harus membelinya dari DOLOG/BULOG (khususnya pada saat krisis yang lalu), prosedur yang dipakai cenderung lebih menguntungkan perusahaan yang memiliki modal cukup besar.

Namun demikian, dari sudut pandang masyarakat (anggota dan bukan anggota koperasi) dan juga dari beberapa narasumber, nampaknya modal bukan satu-satunya kendala bagi koperasi, tetapi juga lemahnya pengelolaan institusi koperasi atau pun institusi yang terkait langsung dengan operasi kerja koperasi (khususnya dalam sistem distribusi dan pasokan sembako).

Dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi, masyarakat (anggota dan bukan anggota koperasi), dan beberapa narasumber serta observasi dapat dilakukan identifikasi masalah/hambatan yang secara riil menjadi rintangan kemajuan aktivitas koperasi khususnya dalam peranannya sebagai pemasok dan penyalur Sembako. Atas dasar masalah yang teridentifikasi ini kemudian dapat diajukan suatu konsep alternatif peningkatan peranan koperasi dalam aktivitas pasokan dan distribusi Sembako.

4.4.1. Masalah-masalah Pengembangan Peran Koperasi (Terutama dalam Aktivitas Distribusi Sembako)

Dalam membahas masalah/hambatan pengembangan peranan koperasi dalam distribusi sembako, kiranya beberapa permasalahan pengembangan koperasi secara umum sekaligus menjadi permasalahan dalam pengembangan koperasi dalam distribusi sembako. Namun demikian, ada juga masalah yang khusus hanya terkait dengan permasalahan peranan koperasi dalam pasokan dan distribusi sembako. Masalah/hambatan dapat diklasifikasikan menjadi masalah internal yang seyogyanya bisa diatasi sendiri atau dengan bantuan pihak lain (pemerintah) dan masalah eksternal yang pada dasarnya di luar kendali koperasi.

Dari penelitian yang dilakukan di dua lokasi penelitian terungkap masalah *internal koperasi* dalam aktivitas pasokan dan distribusi sembako yang sangat penting antara lain:

- ◆ Masalah rendahnya kemampuan SDM pengurus, manajer, dan karyawan koperasi. Dalam hal ini, yang paling pokok adalah rendahnya kualitas entrepreneurship dan managerial dari manajemen koperasi. Rendahnya kemampuan entrepreneurship pengelola koperasi terlihat dari ketidak mampuan mereka dalam memperoleh informasi pasar (baik untuk pasokan maupun pendistribusian/penjualan sembako dan lain-lain). Kalaupun informasi pasar mereka peroleh, mereka cenderung tidak mampu mengolah informasi tersebut menjadi suatu gerakan aktivitas maksimal untuk benefit bagi koperasi. Kenyataannya mereka selalu kalah dari pesaing-pesaing swasta. Sementara itu, lemahnya kemampuan manajerial pangelola koperasi terlihat dari pengaturan dan perencanaan bisnis yang tidak tertata baik yang pada gilirannya melahirkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang produktif dan efisien.
- ◆ Lemahnya permodalan dan akses permodalan. Lemahnya permodalan terutama dikarenakan kurangnya dukungan anggota yang juga terutama bersumber dari kemampuan ekonomi dan rendahnya kesadaran berkoperasi para anggota. Sementara itu, lemahnya akses permodalan terutama karena ketidakpunyaan jaminan/asset koperasi yang selalu menjadi prasyarat penting dalam perolehan pinjaman bagi perbankan, dan lain sebagainya. Lemahnya permodalan inilah yang menghambat pengadaan stok sembako secara efisien dan murah.
- ◆ Relatif rendahnya tingkat kesadaran anggota dalam memberikan dukungan terhadap kemajuan koperasi.

Dari sisi masalah *eksternal koperasi* yang paling pokok dalam aktivitas pasokan dan distribusi sembako antara lain:

- ❖ Relatif lemahnya kemampuan dan keseriusan SDM yang ditugasi pemerintah sebagai pembina koperasi, khususnya dalam penanganan masalah pasokan dan distribusi sembako.
- ❖ Relatif terbatasnya fasilitas pembinaan dan penggunaannya yang tidak efisien khususnya di lingkungan aparat pemerintah.
- ❖ Kurang mendukungnya kebijaksanaan pengembangan koperasi terutama dalam kemudahan akses koperasi terhadap sumber-sumber modal (perbankan)
- ❖ Lemahnya kontrol pemerintah terhadap prosedural Bulog/Dolog dalam memasok Sembako terutama bagi koperasi. Hal ini mengakitbatkan tingginya tingkat permainan/manipulasi pasokan Sembako oleh oknum-oknum Bulog/Dolog terutama di saat krisis

yang tidak dapat diikuti oleh kebanyakan koperasi, sehingga yang diuntungkan adalah pengusaha-pengusaha swasta dan para spekulan yang berkolusi dengan oknum-oknum tersebut. Contoh konkrit ketika terjadi krisis tahun 1998, meskipun koperasi diberi jatah pennebusan beras, minyak goreng, dan gula, namun petugas Dolog membagi-bagi tempat pengambilannya, sehingga biaya transportasi untuk partai-partai kecil ini menjadi mahal sekali. Akibatnya, koperasi tidak berani menebus jatahnya atau menebusnya dengan konsekuensi harganya menjadi di atas harga pasaran.

- ❖ Kebijakan pajak pendapatan progressif bagi akumulasi modal koperasi terasa sangat memberatkan. Padahal sisa hasil usaha koperasi sebagai sumber utama akumulasi modal adalah merupakan kumpulan keuntungan banyak (orang) anggota koperasi yang kalau diperkapitalisasikan adalah di bawah nilai pendapatan minimum objek kena pajak.

4.4.2. Upaya-upaya Pengembangan Peran Koperasi

Dalam usaha meningkatkan peranan koperasi dalam aktivitas pasokan dan distribusi sembako, tentu berbagai hambatan-hambatan pokok di atas harus dapat diatasi. Masalahnya, koperasi sendiri baik di daerah penelitian Bandung maupun Denpasar nampaknya hanya berputar-putar dalam masalah tersebut, sehingga dukungan dari pemerintah sangat diperlukan melalui kebijaksanaan dan programnya yang tepat guna. Dukungan pemerintah bagi usaha peningkatan peran koperasi dalam pasokan dan distribusi Sembako sangat penting dalam menjamin ketenangan hidup rakyat kecil terutama di saat krisis seperti yang telah dan sedang terjadi dua tahun terakhir ini. Dalam puncak krisis pertengahan tahun 1998 lalu, terbukti bahwa tingkat kekurangan Sembako telah melahirkan kebrutalan banyak anggota masyarakat di Indonesia yang pada gilirannya bisa merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Beberapa hal yang direkomendasikan dalam peningkatan koperasi dalam aktivitas dan distribusi Sembako yang pada hakekatnya dapat dilakukan pemerintah, antara lain:

- ☉ Segera menciptakan atau memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan ketrampilan entrepreneurship dan manajemen yang harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik para manajer atau calon manajer koperasi. Selain itu program pembinaan koperasi tidak cukup hanya dengan pelatihan yang sepenggal-sepenggal, tetapi pembinaan total dalam berbagai aspek

yang diperlukan masing-masing koperasi mulai dari pelatihan, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan sampai dinilai koperasi tersebut benar-benar mandiri. Untuk ini memang jumlah koperasi yang tertangani akan terbatas, tetapi dalam kurun waktu yang panjang pasti banyak koperasi dapat secara permanen menjadi maju dan mandiri. Hal ini jauh lebih baik daripada program pembinaan koperasi selama ini yang tanggung-tanggung di mana lebih banyak diberikan pembinaan melalui pendidikan/pelatihan secara general.

- ☉ Meningkatkan secara riil kemampuan dan keseriusan aparat pembina dan fasilitas pembinaan koperasi. Meskipun hal ini merupakan masalah laten, tetapi bila ingin mengembangkan koperasi secara serius, maka hal ini mutlak harus dipenuhi.
- ☉ Perlunya segera direalisasikan kebijakan mempermudah akses koperasi dalam memperoleh pinjaman terutama dari perbankan, khususnya untuk modal pengadaan sembako dan atau sistem konsinyasi sembako dari BULOG.
- ☉ Diterapkannya Undang-Undang pajak Penghasilan tahun 1994 secara konsisten, di mana pajak penghasilan dilakukan penghitungan setelah SHU (sisa hasil usaha) dibagikan terhadap anggota. Hal ini akan membebaskan koperasi dari pengenaan pajak progressif pendapatan, karena bagaimanapun koperasi umumnya merupakan kumpulan rakyat kecil yang secara individu bebas wajib pajak penghasilan.
- ☉ Perlu program gerakan/kampanye nasional tentang penyadaran masyarakat berkoperasi, secara terus menerus.
- ☉ Perlunya Bulog wajib memasok sembako (konsinyasi) terhadap koperasi dengan kontrol yang ketat terhadap aktivitas yang dilakukannya. Untuk itu, dirasakan agar Bulog/Dolog diawasi oleh suatu badan khusus yang independen dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Diharapkan dengan demikian peran dan fungsi Bulog/Dolog sebagai stabilisator persediaan pangan nasional dapat maksimal.
- ☉ Diciptakan suatu networking antar koperasi (*cooperative networking*). Hal ini dapat dilakukan misalnya, dengan membentuk bank yang merupakan kumpulan asset para koperasi, atau bagi wilayah yang mempunyai koperasi dalam jumlah besar, dapat dilakukan dengan membentuk suatu forum komunikasi khusus untuk pengelolaan pasokan dan distribusi Sembako, misalnya dengan didirikan depot atau mini market di masing-masing wilayah.

Diharapkan pemodal besar dapat bekerja sama dengan koperasi dalam penyediaan modal.

Beberapa alternatif pengembangan peranan/fungsi koperasi (khususnya sebagai pemasok dan distributor sembako), maka secara konkrit langkah-langkah yang dapat dilakukan, disajikan dalam tabel berikut:

Masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Pelaksana
Internal:				
Entrepreneurship rendah	Memperbaiki kemampuan entrepreneurship pimpinan koperasi	Pendidikan dan pembinaan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Pendampingan - Pembinaan lanjutan 	Lembaga pendidikan Pemerintah & Swasta, LSM
Permodalan dan akses permodalan lemah	Meningkatkan kemampuan kapital dan kemudahan akses mendapatkannya	Perumusan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Suntikan modal - Kredit lunak - Intensifikasi iuran anggota 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Swasta - Anggota koperasi
Dukungan anggota koperasi rendah	Peningkatan partisipasi aktif dari anggota koperasi	Kampanye pentingnya koperasi	- Iklan layanan masyarakat	Media massa
Eksternal				
Kemampuan dan keseriusan petugas Pemerintah lemah	Meningkatkan kemampuan dan keseriusan petugas pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan - Fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi rutin - Pemberian fasilitas transportasi yang memadai 	Pemerintah Cq Departemen Koperasi
Fasilitas pembinaan yang terbatas dan tidak efisien	Ketersediaan fasilitas dan efisiensi penggunaannya	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi - Inventarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan fasilitas pembinaan - Pengontrolan penggunaan fasilitas 	Pemerintah Cq Departemen Koperasi
Kontrol terhadap pelaksana distribusi sembako rendah	Berjafannya aturan main pasokan dan distribusi sembako secara benar	Sistem kupon untuk jalah pasokan sembako	Mendahulukan pasokan sembako untuk Koperasi	Pemerintah Cq Bulog
Kontrol terhadap sistem perpajakan lemah	Penerapan Undang-undang pajak penghasilan tahun 1994 secara konsisten	Pelaporan SHU secara rutin dan terpisah	Penyetoran pajak penghasilan bagi hasil usaha anggota secara benar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola dan pengurus koperasi - Anggota koperasi - Pemerintah Cq. Dirjen Pajak
Cooperative networking kurang	Terciptanya cooperative networking yang kuat	Pembentukan bank koperasi di setiap wilayah	Kerjasama antar koperasi secara luas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Koperasi

4.5. Kesimpulan

Secara umum ada kesamaan persepsi dan harapan pengurus koperasi dan masyarakat (anggota dan bukan anggota koperasi) di dua lokasi penelitian tentang fungsi koperasi yakni sebagai wadah/tempat/institusi yang dapat menyediakan pinjaman lunak, selalu menyediakan barang/kebutuhan khususnya sembako dengan cara pembayaran mudah (kredit) dan dengan harga murah. Namun demikian, dalam kenyataannya baik pengurus koperasi maupun masyarakat sekitar koperasi yang dijadikan sampel penelitian

menyadari bahwa ada beberapa masalah yang sangat menghambat peningkatan peran koperasi terutama dalam penanganan pasokan dan distribusi sembako secara mudah dan murah tersebut. Masalah keterbatasan modal utamanya untuk kebutuhan pasokan sembako dan lemahnya manajemen pengelolaan (lemahnya SDM) koperasi menjadi sorotan utama mereka. Dalam hal ini mereka berharap adanya bantuan pemerintah dalam mengatasi kedua masalah koperasi tersebut.

Penelusuran dari aspirasi pengurus koperasi, masyarakat (anggota dan bukan anggota koperasi), *in-depth interview* dengan beberapa narasumber dan observasi secara sistematis dapat memberikan identifikasi berbagai masalah/hambatan riil baik yang berasal dari lingkungan internal koperasi maupun eksternal koperasi khususnya bagi peningkatan peranannya dalam pasokan dan distribusi sembako. Secara singkat masalah internal tersebut meliputi rendahnya kemampuan SDM koperasi pada tiap level jabatan, lemahnya permodalan dan aksesnya, dan relatif rendahnya tingkat kesadaran berkoperasi masyarakat. Dalam pada itu masalah eksternal yang paling pokok antara lain lemahnya kontrol pemerintah terhadap tindakan/prosedur pasokan sembako oleh Bulog/Dolog, dan pengenaan pajak pendapatan progressif yang menghambat akumulasi modal koperasi. Meskipun masalah ini memang terkesan merupakan masalah koperasi pada umumnya dan sudah menjadi masalah klasik, namun keberhasilan usaha (penanganan pasokan dan distribusi sembako sebagai salah satu aktivitasnya) sangat tergantung dari kinerja kelembagaannya dalam hal ini koperasi tersebut. Untuk memperkuat keberdayaan koperasi mengembangkan dirinya, adalah juga perlunya dilakukan kerjasama yang baik di antara koperasi-koperasi itu sendiri yaitu membentuk suatu jaringan (*cooperative networking*) yang meliputi segala aktivitas yang menunjang kelancaran usaha (pasokan dan distribusi sembako).

DAFTAR BACAAN

- Bayu Krisnamurthi, 1998 Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil, *AFKAR*, Jurnal tiga bulanan CIDES, Vol.V. No.3, 1998
- Darwin, 1998, *Penanganan Pasokan dan Distribusi Sembako*. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan (PEP-LIPI). Jakarta
- Departemen Koperasi, 1987: *Evaluasi Peranan KUD Dalam Pengadaan Pangan Untuk Pemantapan Swasembada*, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi.
- Hendrojogi, 1998 *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*
PT. Raja Asfindo Persada: jakarta
- Herman Alif Kusumo, 1998. *Memberdayakan Usaha Koperasi*, *AFKAR*.
Jurnal tiga bulanan CIDES, Vol.V. No.3, 1998
- Thoby Mutis, 1992: *Pengembangan Koperasi*, kumpulan Karangan PT.
Grasindo: Jakarta

